

**Praktik Pungutan Denda Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam
(Studi Kasus Pada Kantor Samsat Bersama Polewali Mandar)**



**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Ekonomi Islam
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar**

**Oleh:
FAHRI
10200112058**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahri
Nim : 10200112058
Tempat/ Tgl. Lahir : Polewali, 03 Juli 1994
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Samata-Gowa
Judul : Praktik Pungutan Denda Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kendaraan Roda Dua Pada Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan skripsi yang dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 07 April 2017
Penyusun

Fahri
10200112058

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Praktik Pungutan Denda Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Kendaraan Roda Dua di Kantor Samsat Polewali Mandar)"**, yang disusun oleh Fahri, Nim: 10200112058, mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 07 April 2017 M, bertepatan dengan 10 Rajab 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, dengan beberapa perbaikan.

Samata, 03 Mei 2017 M
07 Sya'ban 1438 H

Dewan Penguji

Ketua	: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Syaharuddin, M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Rahmawati Muin, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Amiruddin K., M.El	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Diketahui Oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag

NIP.19581022 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaiukum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji syukur tiada hentinya penulis haturkan kehadiran Allah swt yang Maha pemberi petunjuk, anugerah dan nikmat yang diberika-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Praktik Pungutan Denda Pajak Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar”. Allahumma Shalli a’la Sayyidina Muhammad, penulis curahkan kehadiran junjungan umat, pemberi syafa’at, penuntun jalan kebajikan, penerang di muka bumi ini, seorang manusia pilihan dan teladan kita, Rasulullah saw, beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman, Amin.

Penulis merasa sangat berhutang budi pada semua pihak atas kesuksesan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga sewajarnya bila pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan semangat dan bantuan, baik secara material maupun spiritual. Skripsi ini berwujud berkat uluran tangan dari insan-insan yang telah digerakkan hatinya oleh sang Khaliq untuk memberikan dukungan, bantuan dan bimbingan bagi penulis.

Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga dan istimewa kepada kedua orang tuaku, **Ayahanda** dan **Ibundaku**, **Musrah** dan **Nuriana** atas segala doa dan pengorbanannya yang telah melahirkan, mengasuh, memelihara, mendidik, dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang serta pengorbanan yang tak terhitung sejak dalam kandungan hingga dapat

menyelesaikan studiku dan selalu memberikanku motivasi dan dorongan baik moril dan materil yang diberikan kepada penulis. Juga kepada seluruh Keluarga, Kakak dan adik yang telah banyak memberikan semangat agar dapat menyelesaikan skripsi ini

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya, penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Porf. Dr. Musafir Pabbabari M.S selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar beserta Wakil Rektor I, II, dan III atas segala fasilitas yang diberikan dalam menimba ilmu didalamnya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta Wakil Dekan I, II, dan III atas segala fasilitas yang diberikan dan senantiasa memberikan dorongan, bimbingan dan nasihat kepada penulis.
3. Ibu Dr. Rahmawati Muin., M.Ag dan bapak Drs. Thamrin Logawali, M.H selaku ketua dan sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang senantiasa memberikan dorongan, bimbingan dan nasehat penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr, Rahmawati Muin M. Ag dan Bapak Dr, Amiruddik K., M. EI selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
5. Kepada semua Staf Akademik, Staf Jurusan dan Bidang Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

6. Semua pihak Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar, yang bersedia menerima dan atas bantuan yang diberikan selama penelitian beserta semua data data dan wawancara yang di gunakan dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Kepada teman-teman kelasku tercinta EKIS 3,4 dan rekan-rekan mahasiswa angkatan 2012 tanpa terkecuali terimakasih atas kebersamaannya menjalani hari-hari perkuliahan, semoga menjadi kenangan terindah yang tak terlupakan
8. Teristimewa kepada Jamaluddin, S.E, dan Wahyuddin, S.E, yang senantiasa memberikan semangat dan membantu dalam penyusunan skripsi.
9. Terismewa pula kepada sahabat-sahabatku Hasbi, Faiz, Furqan, Irham ,Herat, Tati, Maman, dan Hadi yang tak henti-hentinya selalu memberikan semangat dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Buat keluarga kecil di SMA “Tahabas” Arbab, Ibnu, Putri, Aidilla, Wiwi, Ibha, Vivi, Nunu, Ros dan Anggun terima kasih sudah mau menjadi sahabat terbaik dan selalu memberikan dukungan serta masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini
11. Buat teman KKN di Kelurahan Canrego, Kecamatan Polengbangkeng Selatan Kabupaten Takalar (Saad, Nia, Ulfi dan Ita) terima kasih karena sudah mau berbagi perhatian kurang lebih 2 bulan dan selalu memberikan dukungan kepada penulis selama ini

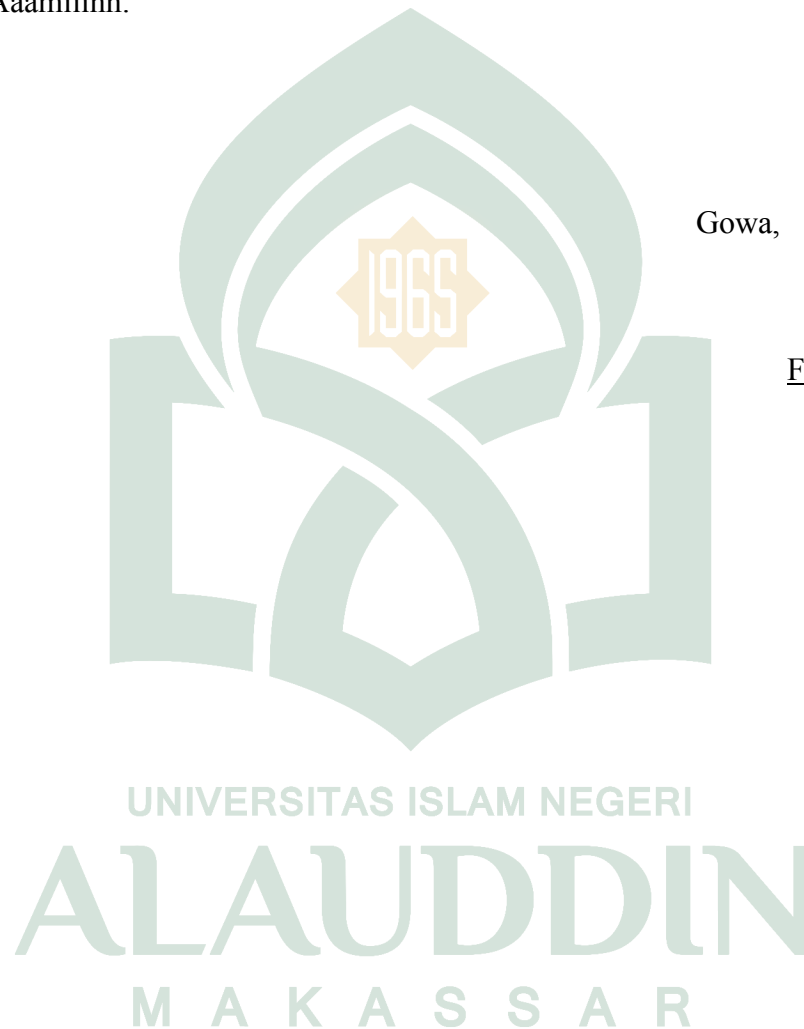
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis menerima saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah swt, penulis memohon ridha dan maghfirah-Nya, semoga segala dukungan serta bantuan semua pihak mendapat pahala yang berlipat ganda disisi Allah swt, semoga karya ini dapat bermanfaat kepada para pembaca. Aaamiiinn.

Wassalam.

Gowa, April 2017

FAHRI



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xi
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-9
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus dan deskripsi Penelitian	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Kajian Pustaka.....	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	10-35
A. Complaine Theory.....	10
B. Social Learning Theory	11
C. Denda Pajak Kendaraan Roda Dua di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar	12
D. Sanksi Pajak.....	23
E. Kepatuhan Wajib Pajak	25
F. Denda Pajak Dalam Islam	26
G. Prinsip-Prinsip Dalam Islam.....	32

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	36-41
A.	Jenis dan Lokasi Penelitian	36
B.	Pendekatan Penelitian.....	36
C.	Sumber Data	37
D.	Instrumen Penelitian.....	37
E.	Metode Pengumpulan Data	38
F.	Teknik Analisis Data	39
G.	Pengujian Keabsahan Data.....	40
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42-67
A.	Gambaran Umum Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar	42
B.	Pajak Kendaraan Bermotor.....	46
C.	Analisis Penentuan Denda kendaraan dalam prinsip Islam.....	58
BAB V	PENUTUP	68-69
A.	Kesimpulan.....	68
B.	Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70-72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Jumlah Kendaraan Bermotor Terdaftar Tahun 2011 - 2014	4
Tabel 4.1	: Jumlah Wajib Pajak Terdaftar tahun 2011-2014	47
Tabel 4.2	: Jumlah Kendaraan Bermotor Terdaftar Tahun 2011-2014	50
Tabel 4.3	: Jumlah Kendaraan Terbayar Tahun 2011-2014.....	53
Tabel 4.4	: Penentuan Denda Pajak.....	56



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Kantor Samsat Polewali Mandar.....44
- Gambar 4.2 : Alur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor52



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel beriku :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي	<i>fathah dan yaa'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... إ...	Fathah dan alif atau yaa'	A	a dan garis di atas
ى	Kasrah dan yaa'	I	i dan garis di atas
و	Dhammmah dan waw	U	u dan garis di atas

Contoh:

مات : *maata*

رَمَى : *ramaa*

قِيلَ : *qiila*

يَمُوتُ : *yamuutu*

4. *Taa' marbuutah*

Transliterasi untuk *taa' marbuutah* ada dua, yaitu *taa' marbuutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *taa' marbuutah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *taa' marbuutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *taa' marbuutah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

الْأَطْفَالِ الرَّوَّضَةُ : *raudah al- atfal*

الْفَاضِلَةُ الْمَدِينَةُ : *al- madinah al- fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan anda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanaa*

نَجَّيْنَا : *najjainaa*

الْحَقُّ : *al- haqq*

نُعَمَّ : *nu''ima*

عُدُّو : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ) maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* menjadi i.

Contoh :

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta’muruuna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur’an (dari *Al-Qur’an*), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fizilaal Al-Qur’an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. *Lafz al- Jalaalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ *diinullah* بِاللهِ *billaah*

Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalaalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh :

hum fi rahmatillaah

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:

Wa ma muhammadun illaa rasul

Inna awwala baitin wudi' alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan

Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al- Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

s.w.t	= <i>subhanallahu wata'ala</i>
s.a.w	= <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
r.a	= <i>radiallahu 'anhu</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
QS.../...38	= QS. Al-Maidah/5:38
HR	= Hadis Riwayat
KUHP	= Kitab Undang-undang Hukum Pidana
hal	= Halaman

ABSTRAK

Nama : FAHRI

Nim : 10200112058

Judul : PRAKTIK PUNGUTAN DENDA PAJAK KENDARAAN RODA DUA DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT POLEWALI MANDAR)

Pokok masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik denda pajak kendaraan roda dua di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar? dan untuk mengetahui tinjauan penetapan denda pajak kendaraan roda dua di Kantor Bersama Samsat di Polewali Mandar apakah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam?, Pokok masalah tersebut selanjutnya dirinci kedalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian yaitu bagaimana kantor bersama samsat polewali mandar menentukan besarnya pajak kendaraan roda dua setiap kendaraan?, Apakah semua kendaraan yang terdaftar sebagai wajib pajak patuh membayar pajak?, dan bagaimana penentuan denda pajak bagi yang terlambat membayar?

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan ekonomi. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kantor samsat Polewali mandar dan wawancara serta data sekunder dari riset kepustakaan. Selanjutnya metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi untuk selanjutnya dianalisis dengan cara mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alur pembayaran denda pajak di kantor samsat polewali mandar sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana mestinya. Selain itu, denda pajak yang digunakan di kantor samsat Polewali mandar pada kendaraan roda dua sudah sesuai dengan aturan SK Gubernur Sulbar namun aturan denda pajak tersebut tidak sesuai dengan prinsip dalam ekonomi Islam, yaitu prinsip keadilan

Kata kunci: Pajak, denda, wajib pajak, roda dua

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pajak yang mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang kenegaraan maupun di bidang sosial dan ekonomi. Pada mulanya pajak bukan merupakan suatu pungutan tetapi hanya pemberian suka rela dari rakyat kepada raja dalam pemeliharaan kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara dari serangan musuh dari luar, membuat jalan umum, membiayai pegawai kerajaan dan sebagainya. Selain itu pada masa pemerintahannya, Rasulullah SAW menerapkan jizyah, yakni pajak yang di bebaskan kepada orang-orang non-muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah, serta pengecualian dari wajib militer.

Besarnya jizyah adalah satu dinar per tahun untuk setiap orang laki-laki dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, penderita penyakit jiwa, dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini. Di antara ahli kitab yang harus membayar pajak adalah orang najran yang beragama Kristen pada tahun keenam Hijriyah dan penduduk asli Ailah, Adzur, serta Adziat pada perang tabuk. Sistem ini terus berlanjut sampai masa pemerintahan Khilafah harun Ar-Rasyid (170-193 H/786-809 M).¹

¹ Adiwarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, 2008), h. 25.

Bagi penduduk yang tidak melakukan penyeteroran dalam bentuk natura maka ia diwajibkan melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk kepentingan umum untuk beberapa hari lamanya dalam satu tahun. Orang yang memiliki status sosial yang tinggi termasuk orang kaya, dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum tadi dengan cara membayar uang ganti rugi ini di tetapkan sesuai dengan jumlah uang yang di perlukan untuk membayar orang lain yang menggantikan melakukan pekerjaan itu.²

Secara umum pajak adalah iuran pada negara yang dapat di paksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat pestasi kembali, yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.

Pajak (*dharibah*) sebagai sumber pendapatan negara. Pakar ekonomi konrenporer mendefenisikan pajak sebagai kewajiban untuk membatar tunai yang di tentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu atau imbalan secara langsung. Di tengah-tengah masyarakat sering kita jumpai berbagai bentuk denda berkaitan dengan transaksi muamalah. Misalnya saja, seorang karyawan atau pegawai yang tidak masuk kerja tanpa izin akan diberikan sanksi berupa pemotongan gaji. telat membayar angsuran kredit juga akan mendapatkan denda setiap hari, seorang peminjam barang telat mengembalikan barang pinjaman sehingga dikenakan denda, seperti

² Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dana Pajak Pendapatan 1994*. (Jakarta: PT.Eresco, Cet,VIII, 1977), h. 3

halnya pada pembayaran pajak kendaraan bermotor yang setiap tahunnya apabila terlambat akan dikenakan sanksi/denda

Persyaratan denda sebagaimana di atas diistilahkan oleh para ulama dengan nama syarth jaza'i. Hukum persyaratan ini berkaitan erat dengan hukum syarat dalam transaksi dalam pandangan para ulama. Ulama tidak memiliki titik pandang yang sama terkait dengan hukum asal berbagai bentuk transaksi dan persyaratan di dalamnya, ada dua pendapat.

Pendapat pertama menyatakan bahwa hukum asalnya adalah terlarang, kecuali persyaratan-persyaratan yang dibolehkan oleh syariat. Adapun pendapat kedua menegaskan bahwa hukum asal dalam masalah ini adalah sah dan boleh, tidak haram dan tidak pula batal, kecuali terdapat dalil dari syariat yang menunjukkan keharamannya. Dengan melihat pendapat para ulama diatas, belum ada kejelasan pasti bahwa denda itu diharamkan atau tidak. penerapan hukum denda hanya berlandaskan fatwa-fatwa ulama semata.³

Oleh karena itu, dalam penelitian kali ini peneliti lebih mengkhususkan pada penerapan denda di Kantor Samsat yang dimana jumlah kendaraan bermotor terdaftar yang ada di Polewali Mandar tentunya setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini tentunya disebabkan karena masyarakat ingin memiliki kendaraan sendiri sehingga jumlah kendaraan yang ada di polewali mandar terus mengalami peningkatan. Kendaraan bermotor itu sendiri di bagi menjadi tiga jenis yaitu Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang berwarna hitam, merah dan . Ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

³ <http://www.alsofwa.com/3864/142-ekonomi-hukum-denda.html>, diakses 25 Juli 2016 pukul 20.22 wita

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor Terdaftar Tahun 2011 - 2014

NO	TAHUN	WARNA TNKB		Jumlah
		Hitam	Merah	
1	2011	48.033	922	48.955
2	2012	53.606	993	54.599
3	2013	65.211	1105	63.316
4	2014	72.735	1178	73913

Sumber: Kantor Samsat Bersama Polewali Mandar

Melihat jumlah kendaraan bermotor terdaftar diatas dengan meninjau pula banyaknya wajib pajak yang melanggar sehingga adanya denda yang terkumpul di kantor samsat hal ini peneliti menyebabkan mengangkat judul dengan pendekatan ekonomi islam yaitu: PRAKTIK PUNGUTAN DENDA PAJAK KENDARAAN DALAM PERSPETIF EKONOMI ISLAM (Studi kasus Kendaraan Roda dua di Kantor Samsat Polewali Mandar)

B. Fokus dan Deskripsi Fokus

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul dan permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya penegasan istilah dari kata-kata yang digunakan dalam judul ini sebagaimana akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Defenisi Praktik dalam KBBI adalah pelaksanaan secara nyata apa yang di sebut dalam teori atau perbutan menerapkan teori.

2. Definisi denda menurut KBBI yaitu keharusan membayar dalam bentuk uang(karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya)
3. Definisi Pajak dalam KBBI yaitu pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus di bayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan , pemilikan, harga beli baran dan sebagainya
4. Kantor Samsat, Pengertian Samsat (Kepolisian, Dispenda dan Jasa Raharja) SAMSAT Merupakan singkatan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.
Samsat sendiri dari 3 Instansi (Data kendaraan – untuk Polda, Pajak Daerah-untuk Pemerintah daerah dan Asuransi – untuk pemilik).⁴

C. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Praktik denda kendaraan roda dua di Kantor Samsat di Polewali Mandar?
2. Apakah penerapan denda pajak kendaraan roda dua di Kantor Samsat Polewali Mandar sudah sesuai apabila di tinjau dari perspektif ekonomi Islam?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada latar belakang, maka penelitian ini bertujuan untuk:

⁴ <http://djafa.org/id/infosamsat-pengertian-samsat/> diakses 15-september-2016, pukul 20.58

1. Untuk mengetahui praktik denda pajak kendaraan roda dua di Kantor Samsat Polewali Mandar
 2. Untuk mengetahui denda pajak kendaraan roda dua di kantor samsat di Polewali mandar sesuai apabila di tinjau dalam perspektif ekonomi Islam.
- Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

- 1) Kegunaan ilmiah: dengan adanya penelitian tersebut semoga dapat menambah wawasan pembaca mengenai Praktik denda pajak kendaraan roda dua terutama di Kantor bersama samsat polewali mandar
- 2) Kegunaan praktisi: dengan adanya penelitian ini, diharapkan para pelajar dan masyarakat sebagai konsumen dapat mengetahui pelaksanaan denda pajak kendaraan roda dua dalam Islam yang mencakup kehidupan sehari-hari.

E. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Pada jurnal yang di tulis sebelumnya oleh Faisar Ananda Arfa yang berjudul “Denda Sebagai Alternatif Hukuman (Kajian Hukum Islam kontemporer)” mengatakan bahwa Denda sebenarnya merupakan jenis hukuman lain yang dikenal di dalam hukum Islam hanya saja kurang dipopulerkan di kalangan ahli hukum sebab denda dianggap sebagai alternatif dari hukuman antara qishash dan maaf. Padahal hukuman ini akan menarik untuk dikaji dan ditawarkan pada era kontemporer ini ketika manusia telah mencapai satu kesadaran penuh tentang hak asasi manusia, bahwa hukuman terhadap si pelaku kejahatan tidak akan mengembalikan bekas bekas kejahatan yang telah

dilakukannya. Oleh karena itu denda dapat dijadikan sebagai hukuman alternatif yang paling rasional dalam era modern sekarang ini.

Selain Jurnal yang ditulis oleh Faisal Ananda Afra ada pula penelitian yang dilakukan oleh Chikmawati (2015) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Denda Biaya Administrasi (Studi Analisis Kehilangan Karcis Parkir di Matahari Departement Store Mal Simpang Lima Semarang)” mengatakan hasil penelitiannya Praktik penarikan ganti rugi kehilangan karcis parkir yang ada di MDS Mal Simpang Lima Semarang telah sampailah pada muara akhir kesimpulan yaitu, Praktik penarikan ganti rugi kehilangan karcis parkir yang ada di MDS Mal Simpang Lima Semarang menurut tinjauan hukum positif itu tidak sesuai karena di dalam Perda kota Semarang yang berlaku saat ini tidak ada satupun aturan jika pengguna jasa parkir kehilangan karcis maka harus membayar biaya ganti rugi karcis parkir. Selain itu, jika pengguna parkir bisa menunjukkan surat resmi sebagai bukti kepemilikan kendaraan, seharusnya tidak perlu adanya biaya ganti rugi. Kemudian, Praktik penarikan ganti rugi kehilangan karcis parkir yang ada di MDS Mal Simpang Lima Semarang menurut tinjauan hukum Islam tidak boleh. Karena salah satu unsur penting adanya penarikan ganti rugi dalam hukum Islam itu adalah adanya pihak kreditur yang dirugikan. Tetapi yang terjadi disini adalah pihak debitur (pengguna jasa parkir) yang mengalami kerugian. Selain itu, ganti rugi disini menurut sebagian masyarakat dirasa cukup memberatkan.

Selain itu ada pula penelitian yang dilakukan oleh Desak Widhiatuti dengan judul “Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor

Bersama Samsat Polewali Mandar” dengan hasil yang mengatakan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar sudah efektif yang dapat dilihat dari target realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai 102% namun masih ada kendala yang dihadapi oleh Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar yaitu masih rendahnya partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu sehingga masih banyak wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajak kendaraan motor. Oleh karena itu, perlu kesadaran dari masyarakat sendiri untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu. Namun, dalam proses prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah efektif karena tidak memerlukan waktu yang lama dalam pembaharuan pajak kendaraan bermotor itu sendiri.

F. Sistematika Penulisan

Tulisan ini terdiri dari lima bab. Setiap bab diuraikan beberapa sub bab yang menjadi penjelasan rinci dari pokok pembahasan. Berikut ini sistematika penulisannya :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan diuraikan lima sub bab yang mendasari penulisan membahas tentang penerapan denda kendaraan roda dua terutama pada Kantor bersama samsat polewali mandar. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan diuraikan tentang landasan teori yang digunakan.

Bab III Metodologi Penelitian

Dalam bab ini peneliti mengemukakan sifat dan jenis serta lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data serta tehnik pengumpulan dan analisis data.

Bab IV Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasannya

Bab V Penutup

Dalam bab ini diuraikan suatu kesimpulan serta saran-saran yang berkaitan dengan hasil peneliti.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Compliance Theory* (Teori Kepatuhan)

Teori kepatuhan memberikan penjelasan mengenai pengaruh perilaku kepatuhan di dalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dengan norma-norma internal mereka dengan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai. Menurut Rosalina (2010) berdasarkan perspektif normatif maka seharusnya teori kepatuhan ini dapat diterapkan di bidang perpajakan. Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang menurut kamus bahasa Indonesia, patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan disiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran atau peraturan. Seseorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka.

Komitmen normatif melalui moralitas personal berarti mematuhi hukum, karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen normative melalui legitimasi berarti mematuhi peraturan kerana otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk melihat perilaku (Septiani, 2005). Dengan konsep tersebut wajib pajak seharusnya patuh agar tidak di denda oleh pemerintah atas keterlambatan membayar pajak. Teori kepatuhan diterapkan pada wajib pajak dalam hal membayar pajak kendaraannya, dengan tertibnya atau patuhnya wajib pajak pada peraturan yang ada maka tidak menuntut kemungkinan pemerintah dapat memaksimalkan dana pajak kendaraan untuk kepentingan masyarakat Dan juga tidak ada lagi masyarakat yang terkena denda

B. Social Learning Theory (Teori Pembelajaran Sosial)

Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung (Jatmiko, 2006). Menurut Bandura (1977) dalam Jatmiko (2006), proses dalam pembelajaran sosial meliputi:

1. Proses perhatian (attentional)
2. Proses penahanan (retention)
3. Proses reproduksi motorik
4. Proses penguatan (reinforcement)

Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut. Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia. Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan. Sedangkan proses penguatan adalah proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model (Bandura, 1977 dalam Jatmiko, 2006).

Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Seseorang juga akan taat pajak apabila telah menaruh perhatian terhadap pelayanan pajak, baik

fiskus maupun sistem pelayanan pajaknya. Terkait dengan proses penguatan, dimana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model, tampaknya cukup relevan apabila dihubungkan dengan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak.⁵

C. Denda Pajak Kendaraan Roda Dua di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar

1. Pengertian Pajak

Pajak dalam bahasa Arab disebut dengan al-Urs atau al-Maks dan ad-Dharibah yang berarti pungutan yang ditarik dari rakyat oleh penerik pajak⁶. Konsep pajak sebenarnya sudah digunakan sejak zaman Rasulullah, pada masa pemerintahannya, Rasulullah SAW menerapkan jizyah (pajak) yakni pajak yang dibebankan kepada orang-orang yang non-muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan keselamatan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah serta pengecualian dari wajib militer. Selain itu Rasulullah juga menerapkan sistem kharaj, yaitu pajak tanah yang dipungut dari kaum nonmuslim ketika wilayah Khabair ditaklukan, tanah hasil taklukan diambil alih oleh kaum muslimin dan pemilik lamanya diberi hak untuk mengelolah tanah tersebut dengan status sebagai penyewa dan bersedia membirikan separoh hasil produksinya kepada negara. Dalam perkembangannya kharaj menjadi sumber pemasukan bagi negara⁷. Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah dharibah yang

⁵Arum Harjanti Puspa, Skripsi “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas “(Studi Di Wilayah Kpp Pratama Cilacap) h.15

⁶Muhammad,”Aspek Hukum Dalam Muamalat,(Yogyakarta: Graham Ilmu,2007),h .158

⁷Yusuf Qardlawi, “Hukum Zakat”, 1997, (Jakarta: Pustaka Litera InterNusa,) h. 26

artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain.⁸ Pajak (Jizyah) wajib dibayarkan sesuai dengan firman Allah dalam Qs. At-Taubah/9: 29

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Terjemahnya:

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.⁹

Pada masa Khulafaur Rasyidin juga menerapkan pajak seperti halnya Rasulullah saw. Abu Bakar As-Shiddiq juga melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan, sebagian dibagikan kepada kaum Muslimin dan sebagian yang lain tetap menjadi tanggungan negara. Disamping itu, ia juga mengambil alih tanah-tanah dari orang yang murtad untuk kemudian dimanfaatkan demi kepentingan umat Islam secara keseluruhan. Selama masa pemerintahan Abu Bakar As-Shiddiq, harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin, bahkan ketika Abu Bakar As-Shiddiq wafat, hanya ditemukan satu dirham dalam perbendaharaan negara. Seluruh kaum muslimin mendapat manfaat yang sama

⁸A.W. Munawwir, kamus Al- Munawwir, (Surabaya;Pustaka Progresif, 2002),h. 815

⁹ Kementrian Agama RI, *Al Quran Keluarga*, (Bandung: CV Media FitrahRabbani,2012), h. 191

dan tidak ada seorang pun yang dibiarkan dalam kemiskinan. Kebijakan tersebut berimplikasi pada peningkatan Aggregate Demand dan Aggregate Supply yang pada akhirnya akan menaikkan total pendapatan nasional, disamping itu memperkecil jurang pemisah antara orang-orang yang kaya dengan yang miskin.

Kemudian pada masa pemerintahan Umar bin Khattab Ada beberapa hal penting yang perlu dicatat berkaitan dengan masalah kebijakan ekonomi pada masa Umar ibn Al-Khattab, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pendirian Lembaga Baitul Mal

Seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa pemerintahan Umar ibn Al-Khattab, pendapatan negara mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini memerlukan perhatian khusus untuk mengelolanya agar dapat dimanfaatkan secara benar, efektif dan efisien. Setelah melakukan musyawarah dengan para pemuka sahabat, khalifah Umar ibn Al-Khattab mengambil keputusan untuk tidak menghabiskan harta Baitul Mal sekaligus, tetapi dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada, bahkan diantaranya disediakan dana cadangan. Cikal bakal lembaga Baitul Mal yang telah dicetuskan dan difungsikan oleh Rasulullah saw. dan diteruskan oleh Abu Bakar As-Shiddiq, semakin dikembangkan fungsinya pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibn Al-Khattab sehingga menjadi lembaga yang regular dan permanen. Pembangunan institusi Baitul Mal yang dilengkapi dengan sistem administrasi yang tertata baik dan rapi merupakan kontribusi terbesar yang diberikan oleh Khalifah Umar ibn Khattab

2. Klasifikasi dan Alokasi Pendapatan Negara

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, pemerintahan yang berkaitan dengan pendapatan negara adalah mendistribusikan seluruh pendapatan yang diterima. Kebijakan tersebut mengalami perubahan pada masa Umar ibn Al-Khattab..Pada saat itu, pendapatan meningkat tajam dan Baitul Mal didirikan secara permanen di pusat ibukota dan ibukota provinsi. Pada masa pemerintahannya, Umar ibn Al-Khattab mengklasifikasi pendapatan Negara menjadi empat bagian, yaitu :

- a). Pendapatan Zakat dan Ushr. Pendapatan ini didistribusikan pada tingkat lokal jika kelebihan penerimaan sudah disimpan di Baitul Mal pusat dan dibagikan kepada delapan ashnaf.
- b). Pendapatan Khums dan Sedekah. Pendapatan ini didistribusikan kepada fakir miskin atau untuk membiayai kesejahteraan mereka, tanpa deskriminasi apakah ia seorang muslim atau bukan.
- c). Pendapatan Kharaj, Fai, Jizyah, Ushr dan sewa tanah. Pendapatan ini digunakan untuk dana pensiun dan dana bantuan serta untuk menutupi biaya operasional administrasi, kebutuhan militer, dan sebagainya.
- d). Pendapatan lain-lain. Pendapatan ini digunakan untuk membayar para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar dan dana sosial lainnya.

Dalam sistem ekonomi konvensional (non muslim), kita juga mengenal adanya istilah pajak (tax). Pajak (tax) di sini maknanya adalah sebuah pungutan wajib; berupa uang yang harus di bayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib

kepada negara atau pemerintah.¹⁰ Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa jizyah dan kharaj dipungut secara dharibah, yakni wajib.¹¹ Bagi suatu negara, pajak memegang peranan yang penting yaitu sebagai sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan – kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta sebagai alat regulasi. Sebagai regulasi pajak dipergunakan sebagai redistribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, realokasi sumber – sumber ekonomi.

Selanjutnya pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Memasuki enam tahun kedua masa pemerintahannya Utsman ibn Affan, tidak terdapat perubahan situasi ekonomi yang cukup signifikan. Berbagai kebijakan Khalifah Utsman ibn Affan yang banyak menguntungkan keluarganya telah menimbulkan benih kekecewaan yang mendalam bagi sebagian besar kaum Muslimin. Akibatnya pada masa ini, pemerintahannya lebih banyak diwarnai kekacauan politik yang berakhir dengan terbunuhnya sang Khalifah.¹²

Andriani, mendefenisikan pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung

¹⁰Gusfami ,Pajak menurut syariah,(Jakarta ; PT Rajagrafindo Persada, 2011) h. 29

¹¹.As-Sarahsi, Al-Mabsuth, Dalam Yahya Abdurrahman, Dhariba(Pajak), [Http:// Asy-Syawkani, Fath al-Qadir, 3/493](http://Asy-Syawkani,Fath-al-Qadir,3/493), Dalam Yahya Abdurrahman

¹² Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008) Edisi Ketiga, h. 81-82

dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan¹³. Menurut Rochmat Soemitro, dalam bukunya Pengantar singkat Hukum Pajak, Pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada dalam masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu. Masyarakat terdiri dari individu dan individu mempunyai hidup sendiri dan kepentingan sendiri, yang dapat dibedakan dari hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Namun individu tidak mungkin hidup tanpa adanya masyarakat. Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu, kelangsungan hidup negara berarti juga kelangsungan hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Untuk kelangsungan hidup masing-masing diperlukan biaya. Biaya hidup individu menjadi beban dari individu yang bersangkutan, sedangkan biaya hidup negara adalah untuk kelangsungan hidup alat – alat negara, administrasi negara, lembaga – lembaga negara, dan seterusnya yang harus dibiayai dari penghasilan negara.

Penghasilan negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada dalam negara itu. Dua sumber tersebut merupakan sumber yang sangat penting bagi penerimaan negara, dan penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang pada akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Jadi dimana ada kepentingan masyarakat disitu akan timbul pungutan pajak sehingga dapat dikatakan bahwa pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum.

¹³ Muruddin Ali, Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h .7

Pungutan pajak mengurangi penghasilan/kekayaan individu, tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pengeluaran – pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat, yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak.

Menurut Rochmat Soemitro memberikan definisi pajak sebagai berikut “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum” Dan penjelasannya sebagai berikut : “Dapat dipaksakan” artinya : bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan, terhadap pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.¹⁴

Pengertian pajak menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah : Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah menurut Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada

¹⁴Rochmat Soemitro, “Dasar – Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan: Perpajakan Indonesia,”(Jakarta : Salemba Empat, Jakarta, 2003,) h. 4

daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

Dari beberapa pengertian tentang definisi pajak sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan :

- a. Iuran atau kontribusi di dalam Undang – Undang lebih ditekankan pada istilah “peran serta” yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan yang berakibat adanya sanksi.
- b. Yang dipungut oleh Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah Provinsi ; Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung.
- c. Yang oleh Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten / Kota; dipergunakan untuk membiayai pengeluaran dalam penyelenggaraan negara / pemerintahan.

2. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Istilah-istilah umum (PERDA Nomor 4 Tahun 2003)

- a. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu

menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

- b. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan umum penumpang maupun barang yang dipungut bayaran dengan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor plat dasar kuning serta huruf dan angka hitam.
- c. Kendaraan Bermotor alat-alat berat atau alat-alat besar adalah alat-alat yang dapat bergerak / berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.
- d. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
- e. Penguasaan adalah penggunaan dan atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundangan yang berlaku.

3. Dasar Hukum Pemungutan PKB

Pemungutan PKB di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan PKB pada suatu provinsi adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

- c. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PKB. Peraturan daerah ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk PKB, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Peraturan Daerah tentang PKB.
- d. Keputusan gubernur yang mengatur tentang PKB sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PKB pada provinsi dimaksud. Sebagaimana poin 3 di atas, keputusan gubernur yang mengatur tentang PKB dapat dibuat menyatu, yaitu suatu keputusan gubernur untuk PKB, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Keputusan Gubernur tentang PKB.

4. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

- a) Nilai Jual Kendaraan Bermotor
- b) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Bobot ini dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai, koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi, dan koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Bobot ini dihitung berdasarkan faktor-faktor :

- 1. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor.

2. Jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya.
3. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor hanyalah nilai jual kendaraan bermotor. Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau kembali setiap tahun. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (melalui Samsat) bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor yang dibayar sekaligus di muka.

5. Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Roda Dua Terdaftar di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar

Wajib pajak terdaftar merupakan masyarakat yang mendaftarkan kendaraan pribadinya di Kantor Samsat dan ini biasa dilakukan setiap pertama kali membeli kendaraan dan membuat STNK secara langsung masyarakat tersebut sudah terdaftar memiliki kendaraan.

6. Objek Pajak

Yang menjadi objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dikecualikan sebagai objek pajak PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh :

- a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan azas timbal balik.
- c. Pabrik atau importir yang semata-mata disediakan untuk dipamerkan atau tidak untuk dijual.

D .Sanksi Pajak

Denda adalah hukuman yang diberikan berupa pembayaran sejumlah uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku. Berdasarkan suyatmin (2004) Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan ke kas negara di sebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman (Thahyono, 2005;2 dalam anita dkk2010). Pajak yang di bayarkan oleh para wajib pajak dipergunakan untuk melakukan pembangunan agar terciptanya pemerataan ekonomi masyarakat.

Menurut Jatmiko Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Menurut Thahyono (2005;464) dalam Sapriadi

(2013;9), sanksi pajak adalah suatu tindakan yang di berikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi pajak merupakan alat control yang mengontrol agar wajib pajak tetap mematuhi kewajiban perpajakan dikarenakan adanya kerugian yang akan di dapat oleh wajib pajak apabila tidak membayar pajak yang secara otomatis akan membuat wajib pajak harus berpikir apabila tidak ingin memenuhi kewajiban perpajakannya¹⁵

Muliati dan Setiawan (2010) dalam mashuroh (2013;29) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/di taati / dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan

Jadi Sanksi pajak merupakan hukuman yang di berikan kepada wajib pajak yang melanggar norma –norma atau peraturan perpajakan baik di sengaja maupun karena di lupa

Dalam riset Masrullah (2013;28) dijelaskan mengenai undang-undang no 28 tahun 2007 tentang ketentuan dan cara perpajakan di sebutkan ada dua macam sanksi, yakni :

1. Sanksi Administrasi, terdiri dari:
 - a. Sanksi administrasi berupa denda
 - b. Sanksi administrasi berupa bunga
 - c. Sanksi administrasi berupa kenaikan

¹⁵Pradanata, Pengaruh pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan dan pelaksanaan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor pelayanan pajak pratama batu, . Skripsi (Malang: Fak Ekonomi, 2014.), h. 7.

2. Sanksi pidana, terdiri dari:

- a. Pidana Kurungan
- b. Pidana Penjara

Berdasarkan undang-undang diatas jelas bahwa setiap wajib pajak yang melanggar akan dikenakan sanksi yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan bentuk pembayaran kerugian kepada negara karena telat membayar pajak, sedangkan sanksi pidana merupakan jeratan hukum yang di berikan kepada wajib pajak yang pelanggarannya tergolong berat.

Moderinisasi administrasi perpajakan merupakan upaya negara untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya ada hubungan yang signifikan antara administrasi perpajakan modern, kepatuhan pajak, dan sanksi pajak. Semangat pajak dan pelayanan pajak di mana variabel- variabel itu berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan pajak (Rahman: 2014)

E .Kepatuhan wajib pajak

Patuh dalam pengertian secara umum merupakan tunduk dan taat terhadap suatu hal. Patuh dalam istilah perpajakan berarti tunduk dan taat terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Devano dan Rahayu dalam Supriadi (2013;7) menyatakan kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.

Menurut Kahono “Kepatuhan berarti patuh dan taat pada peraturan yang berlaku”. Dalam hal perpajakan aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan dari beberapa defenisi di atas dapat di simpulkan kepatuhan adalah

tunduk dan taat terhadap suatu aturan yang berlaku¹⁶. Bagi negara –negara berkembang untuk mendapatkan keuntungan dari kesempatan yang diberikan oleh globalisasi negara harus mampu memobilisasi pendapatan fiskal yang memadai. Cara yang paling dapat diandalkan untuk mendapatkannya adalah dengan administrasi pajak yang efektif. Administrasi perpajakan dapat memainkan peran penting tidak hanya dalam membentuk pembangunan ekonomi tetapi dalam mengembangkan negara yang efektif¹⁷

F .Denda Pajak Dalam Islam

Ajaran Islam telah menjelaskan bahwa sesungguhnya tujuan dasar Islam adalah terwujudnya kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam praktiknya, Rasulullah saw membangun suatu perekonomian yang dulunya dari titik nol menjadi suatu perekonomian raksasa yang mampu menembus keluar dari jazirah Arab. Pemerintah yang di bangun Rasulullah saw di Madinah mampu menciptakan suatu aktifitas perekonomian yang membawa kemakmuran dan keluasan pengaruh pada masa itu.¹⁸

1. Pengertian Denda

Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah *gharamah*. Secara bahasa *gharamah* berarti denda. Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda mempunyai arti hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang oleh hakim dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau sepuluh juta rupiah uang yang harus

¹⁶ Kahono Sulud, Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Semarang 2003),h . 32. Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan : Studi Empiris Di Wilayah Kp Pbb Semarang” Tesis (Semarang :Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro

¹⁷ Richard M Bird, “Improving Tax Administration in Developing Countries. Tax Administration Vol 1.1(2015)

¹⁸ Agung eko purwana, “Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam”, (Ponorogo;Justitia Islamica,2014), h. 22

dibayarkan sebagai hukuman karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya lebih baik membayar dapat dipenjarakan.¹⁹ Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman ta'zir. Ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan Ar-Raddu Wal Man'u, yang artinya menolak dan mencegah.²⁰

Kehidupan Rasulullah saw dan masyarakat muslim di masa beliau adalah teladan yang paling baik implementasi Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Meskipun pada masa sebelum kenabian Muhammad saw adalah seorang pebisnis, tetapi yang dimaksudkan perekonomian di Rasulullah di sini adalah pada masa madinah. Pada periode makkah masyarakat muslim belum sempat membangun perekonomian, sebab masa itu penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan diri dari intimidasi orang-orang Quraisy.²¹

2. Hukum Denda dalam Islam

Tindak pidana Ta'zir adalah perbuatan-perbuatan maksiat dan kejahatan/pelanggaran yang diancam kepada pelakunya dengan sanksi hudud/qishas, diyat atau kifarat, baik yang terkait langsung dengan hak Allah maupun hak sesama manusia (masyarakat).

Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hambali, termasuk

¹⁹Gudang Ilmu Syariah, kumpulan ilmu pengetahuan Islam”
<http://gudangilmusyariah.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-denddalam-perspektif-Islam.html>,
 diakses pada pukul 19.27 tanggal 8 sep 2016)

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005.), h. Xii.

²¹Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam P3EI, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerjasama Dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Press 2014), h. 32.

Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana ta'zir. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta. Dalam hadits itu Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

“Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari tuhan kami.” (HR. an-Nasa'i).²²

Menurut mereka hadits ini secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat. Dalam riwayat dari Amr bin Syu'aib diceritakan bahwa:

“Jika seseorang mengambil buah-buahan di kebun sekedar untuk dimakan (karena lapar), maka dia tidak dikenakan hukuman. Tetapi jika ia mengambil buah-buahan itu untuk dibawa keluar dari kebun, ia dikenakan denda seharga buah yang diambil, dan dikenakan juga hukuman lain”. (HR. an-Nasa'i).²³

Imam asy Syafi'i al-qoul ql-jadid, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana ta'zir. Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku di awal Islam telah dinasakhkan (dibatalkan) oleh hadis Rasulullah saw, diantaranya hadits yang mengatakan bahwa:

²²Gudang Ilmu Syariah, Kumpulan Ilmu Pengetahuan Islam”
<http://gudangilmusyariah.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-denddalam-perspektif-Islam.html>, di akses pada jam 20.00 tanggal 8 sep 2016.

²³<http://tebuieng.org/denda-telat-bayar-hutang/tanya-jawab-agama.html>, di akses pada jam 20.58 pada tanggal 8 sep 2016

“Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat.” (HR. Ibnu Majah).

Menurut mereka, campur tangan hakim dalam soal harta seseorang, seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana ta'zir, termasuk kedalam larangan Allah swt dalam ayat di atas, karena dasar hukum denda itu tidak ada. Ini adalah perbedaan pendapat para ulama tentang hukuman denda. Ulama yang melarangnya berpendapat bahwa hukuman denda yang pernah ada telah dihapus dengan hadis Rasulullah di atas. Barulah pada periode madinah Rasulullah memimpin masyarakat madina menjadi lebih sejahtera dan beradab. Meskipun perekonomian pada masa itu masih relative sederhana. Tetapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi. Karakter umum dari perekonomian pada masa itu adalah komitmennya yang tinggi terhadap etika dan moral, serta perhatiannya yang besar terhadap keadilan dan pemerataan kekayaan.

Hukum persyaratan semisal ini berkaitan erat dengan hukum syarat dalam transaksi dalam pandangan para ulama. Ulama tidak memiliki titik pandang yang sama terkait dengan hukum asal berbagai bentuk transaksi dan persyaratan di dalamnya, ada dua pendapat.

Pendapat pertama menyatakan bahwa hukum asalnya adalah terlarang, kecuali persyaratan-persyaratan yang dibolehkan oleh syariat. Adapun pendapat kedua menegaskan bahwa hukum asal dalam masalah ini adalah sah dan boleh, tidak haram dan tidak pula batal, kecuali terdapat dalil dari syariat yang menunjukkan haram dan batalnya.

Singkat kata, pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang kedua, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Dalam banyak ayat dan hadits, kita dapatkan perintah untuk memenuhi perjanjian, transaksi, dan persyaratan, serta menunaikan amanah. Jika memenuhi dan memperhatikan perjanjian secara umum adalah perkara yang diperintahkan, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa hukum asal transaksi dan persyaratan adalah sah. Makna dari sahnya transaksi adalah maksud diadakannya transaksi itu terwujud, sedangkan maksud pokok dari transaksi adalah dijalankan.

- b. Kemudian Hadist Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda yang artinya :

“Kaum muslimin itu berkewajiban melaksanakan persyaratan yang telah mereka sepakati.” (Hr. Abu Daud dan Tirmidzi)²⁴

Makna kandungan hadits ini didukung oleh berbagai dalil dari al-Quran dan as-Sunnah. Maksud dari persyaratan adalah mewajibkan sesuatu yang pada asalnya tidak wajib, tidak pula haram. Segala sesuatu yang hukumnya mubah akan berubah menjadi wajib jika terdapat persyaratan. Selain itu, umat Islam juga diperintahkan untuk memenuhi perjanjian, transaksi, persyaratan, dan menunaikan amanah. Jika memenuhi perjanjian adalah perkara yang diperintahkan, maka memberlakukan persyaratan tertentu (seperti denda) adalah sah

Pendapat inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya, Ibnul Qayyim. Ibnu Taimiyyah mengatakan, “Segala syarat yang tidak menyelisihi syariat adalah sah, dalam semua bentuk transaksi. Semisal penjual

²⁴ <https://alsofwah.or.id/cetakekonomi.php?id=142&idjudul=1Hikmah-al-quran-dan-mutiara-hadist> di akses pada pukul 20.41 tanggal 8 September 2016.

yang diberi syarat agar melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dalam transaksi jual-beli, baik maksud pokoknya adalah penjual ataupun barang yang diperdagangkan. Syarat dan transaksi jual-belinya adalah sah.”

Ibnu Qayyim mengatakan, “Kaidah yang sesuai dengan syariat adalah segala syarat yang menyelisihi hukum Allah dan kitab-Nya adalah syarat yang dinilai tidak ada (batil). Adapun syarat yang tidak demikian adalah tergolong syarat yang harus dilaksanakan, karena kaum muslimin berkewajiban memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama, kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Inilah pendapat yang dipilih oleh guru kami, Ibnu Taimiyyah.”²⁵ Menurut ulama yang membolehkan, hadits-hadits tersebut secara tegas menunjukkan kebolehan mengenakan denda pada orang yang enggan membayar (zakat/pajak maupun hutang).

Oleh karena itu, ulama yang membolehkan denda menetapkan 2 (dua) syarat. Pertama, denda tersebut tidak boleh disyaratkan di awal akad, untuk membedakannya dengan riba Jahiliyah (riba nasi'ah). Dalam hal ini denda tidak termasuk riba nasi'ah karena pemanfaatan dana denda bukan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan orang banyak. Kedua, denda hanya diberlakukan bagi orang yang mampu tapi menunda pembayaran.

Kesimpulannya, menjatuhkan denda itu diperbolehkan pada semua jenis transaksi, selain transaksi hutang-piutang. Untuk transaksi hutang-piutang, ada sebagian ulama yang membolehkan, asalkan dendanya tidak disyaratkan di awal

²⁵. Situs dakwah dan informasi Islam “denda dalam kacamata syariah”, <http://ekonomisyariat.com/denda-dalam-kacamata-syariah/di> akses pada pukul 20.35 tanggal 09 sep 2015

akad dan hanya berlaku bagi orang yang mampu saja. Nominal denda juga harus wajar dan tidak berlebihan.

Berdasarkan keterangan di atas, maka syarth jaza'i adalah diperbolehkan, asalkan hakikat transaksi tersebut bukanlah transaksi utang-piutang dan nominal dendanya wajar, sesuai dengan besarnya kerugian secara riil

Kemudian hadist yang diriwayatkan oleh Abi Huraira radiyallahu anhu, dia telah berkata yang artinya sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda yang artinya :

“Penangguhan membayar utang oleh orang kaya adalah perbuatan zalim”²⁶.

Hadis ini menjelaskan bahwa menangguhkan pembayaran utang bagi orang yang mampu hukumnya haram sama halnya dengan apabila ada kewajiban yang tidak segera dilaksanakan maka akan dikenakan denda.

G .Prinsip- prinsip dalam Islam.

1 .Tauhid

Tauhid adalah suatu ilmu yang membahas tentang”wujud Allah”, tentang sifat-sifat yang wajib tetap padanya.Asal kata tauhid adalah meyakinkan bahwa Allah a dalah “satu” tidak ada syarikat baginya.²⁷

Kita beriman kepada tauhid yang murni adalah fitrah yang diciptakan oleh Allah dalam diri hamba-hamba-Nya.Tauhid merupakan prinsip dasar ajaran seluruh agama.

²⁶Ahmad Mudjad Mahalli, Hadis-hadis Muttafaq ‘Alaih’, 2004 (Jakarta: Prenada Media) h. 108

²⁷ Syekh Muhammad Abduh “Risalah Tauhid, 1978(Jakarta:Bulan Bintang), h.36

Sedangkan penyelewengan dari tauhid, berupa penyembahan kepada selain Allah, menisbatkan anak untuk Allah, dan keyakinan bahwa zat Allah menyatu dalam diri makhlukNya, semua ini adalah kemusyrikan dan penyelewengan yang diingkari oleh seluruh nabi dan rasul.²⁸

Sebahagian besar para ulama membolehkan pemberian denda , dalam hal ini denda pajak. Karena mereka berpendapat bahwa seorang hakim boleh memberikan hukuman atas tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan pandangan diatas dapat disimpulkan denda diperbolehkan selama objek yang dikenakan denda sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat dalam hal ini adalah zakat/pajak. Jika ditinjau dari denda yang diterapkan di kantor samsat, dimana objek dari denda tersebut adalah pajak, dan pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur selain itu pembayaran pajak juga terdapat pada zaman Rasulullah, jadi dengan berdasarkan pada pandangan mazhab Hambali denda pajak dikantor samsat boleh dalam syariat Islam

2. Akhlak/ikhlas

Secara etimologi, istilah Akhlak berasal dari bentuk jamak khuluk yang berarti watak, tabiat, perangai dan budi pekerti. Imam al-Ghazali memberi batasan khuluk sebagai : “Khuluk adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong lahirnya perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa pertimbangan dan pemikiran mendalam”. Dari pengertian ini, suatu perbuatan dapat disebut baik jika dalam perbuatan-perbuatan baik itu dilakukan secara spontan dan tidak ada paksa

²⁸<http://www.Prinsip-PrinsipIslamDalamKehidupanVOA-ISLAM.COM.html.dpbs>

Dalam Islam, akhlak menjadi salah satu inti ajaran. Fenomena ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an surat al-Qalam/68 : 4

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Terjemahan:

“dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.”²⁹

Akhlak adalah suatu system nilai yang mengatur tindakan dan pola sikap manusia di muka bumi . Bagi masyarakat yang dengan sengaja meninggalkan apa yang telah menjadi kewajibanya dalam membayar pajak adalah suatu kedzaliman. Denda pajak yang diterapkan di kantor samsat tidak ada unsur pemaksaan melainkan kerelaan karena wajib pajak sebelumnya telah mengetahui bahwa setelah mereka mendaftarkan kendaraannya maka mereka mempunyai kewajiban untuk membayar pajak kendaraan roda duanya setiap tahun atau dengan kata lain wajib pajak menerima adanya denda.

3. Adil

Al-Adl makna yang dimaksud dengan al-'adl ialah jika seseorang menunaikan apa yang seharusnya ia tunaikan sebagaimana ia menuntut apa yang menjadi haknya. Kita di perintahkan untuk menaati Allah Swt, yakni menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya . kemudian perintah untuk menaati Rasulullah saw. Rasulullah saw di utus dengan membawa risalah dari Allah swt yang wajib di taati. Lalu perintah mengikuti ulul amri atas peraturan yang dibuat

²⁹ Kementrian Agama RI, *Al Quran Keluarga*, (Bandung: CV MediaFitrahRabbani,2012), h. 564

oleh mereka. Keterkaitan denda dengan prinsip keadilan dalam hal ini wajib pajak berkewajiban menunaikan apa yang telah menjadi di perintahkan untuk dia yaitu membayar pajak kandaraannya setiap tahunnya agar bisa berlaku adil. Sama seperti halnya masyarakat menuntut apa yang sudah menjadi hak nya. Seperti firman Allah SWT dalam Surah Qs Al-Maidah /5; 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ ۖ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ ۖ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahan :

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.³⁰

Prinsip ekonomi Islam tentang denda apabila di tinjau dari prinsip keadilan juga diperbolehkan karena seorang muslim wajib memenuhi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini denda pajak termasuk dalam kewajiban setiap muslim yang wajib tunduk dengan perintah dari pemerintah sebagai amirul mukminin.

³⁰ Kementrian Agama RI, *Al Quran Keluarga*, (Bandung: CV MediaFitrahRabbani,2012), h. 108

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.³⁰

Secara keseluruhan jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam material yang ada di lapangan. Dalam hal ini, penelitian pada kantor bersama samsat bersama Polewali Mandar

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian berlokasi di kantor Bersama samsat bersama di jalan H.A Depu Polewali No 151

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti adalah Ekonomi dan Sosiologis. Peneliti melakukan pendekatan ekonomi karena berkaitan dengan lembaga keuangan sebagai tonggak perekonomian dan sosiologis karena peneliti melakukan interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Dalam hal ini peneliti menganalisis Praktik denda pajak kendaraan roda dua dalam Islam yang ada di Kantor bersama samsat Polewali Mandar

³⁰ Basrowi dan Suwandi, Mamahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 2

C. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.³¹

Data primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Kantor bersama samsat Polewali dan wawancara dengan beberapa informan yang menjadi wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak di kantor samsat polewali mandar, sedangkan data sekunder diperoleh dari riset kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan memahami buku, artikel, jurnal, majalah atau data dari internet yang berkaitan dengan riset ini.

D. Instrument Penelitian

Instrument penelitian adalah perangkat untuk menggali data primer dari informan sebagai sumber data terpenting dalam sebuah penelitian.³² Istilahnya instrumen sebagai alat bantu dalam menggunakan metode pengumpulan data merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam benda yang dalam penelitian ini meliputi pedoman wawancara, pedoman observasi, alat tulis, kamera, serta *handphone*.

³¹Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2009), Edisi 3, h. 148.

³²Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 59.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi merupakan pengamatan dimana peneliti mengamati langsung terhadap gejala-gejala obyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi yang diadakan. Observasi sangat perlu guna mendeskripsikan realita pelaksanaan kegiatan di kantor bersama samsat polman

2. Wawancara

Wawancara personal diartikan sebagai wawancara antar orang, yaitu antara peneliti (pewawancara) dengan responden/Informan (yang di wawancarai) yang di arahkan oleh pewawancara untuk tujuan memperoleh informasi yang relevan .³³ Wawancara merupakan proses tanya jawab dengan informan yang dianggap perlu untuk diambil keterangannya mengenai masalah yang akan dibahas. Wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan

³³ Mudjarat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi Edisi Ke 3*,(Jakarta :Penerbit Erlangga 2009), h. 160

permasalahan yang harus diteliti, dan untuk mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam..

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara mengambil atau membuat dokumen atau catatan-catatan yang dianggap perlu. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel dan dapat dipercaya jika didukung dengan dokumentasi.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu sebagai berikut :

1.Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Data Display (Penyajian Data)

Hal yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang telah terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

G. Pengujian Keabsahan Data

Untuk menguji kredibilitas data penelitian, peneliti menggunakan teknik Triangulasi. Teknik triangulasi data adalah menyaring data dengan berbagai metode dan cara dengan menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan. Setelah mendapatkan data yang jenuh yaitu keterangan yang didapat dari sumber-sumber data telah sama maka data yang didapatkan lebih kredibel.

Dalam tehnik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai tehnik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai tehnik penumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai tehnik pengumpulan data dan berbagai sumber data³⁴

Sugiyono membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda

³⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h . 241

dalam penelitian kualitatif. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan yang dikatakan secara pribadi
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian apa yang dikatakan sepanjang waktu
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Jadi setelah penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian data hasil dari penelitian itu digabungkan sehingga saling melengkapi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar

1. Profil Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar

Awal terbentuknya Kantor Samsat Polewali Mandar mencakup/membawahi wilayah Kabupaten Mamasa dan Polman sendiri namun setelah terjadi pemekaran antara Kabupaten Mamasa dan Polewali Mandar maka Kabupaten Mamasa memungut pajak kendaraannya sendiri. Pada tanggal 6 September 2007 berdirilah Kantor Samsat Polewali Mandar yang bertugas memungut pajak kendaraan bermotor khusus di wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang berlokasi di JL.H.A.DEPU NO.151 Polewali.

Berdirinya Kantor Samsat Polewali Mandar akan mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan karena sebelumnya semua proses pembayaran pajak di lakukan di Kantor Samsat Majene yang cukup jauh dijangkau oleh masyarakat yang berada di daerah Polewali. Kantor Samsat Polewali Mandar sendiri merupakan kantor ke 4 yang berdiri di Sulawesi Barat . Awal berdirinya Kantor Samsat Polewali hanya terdiri dari satu seksi untuk jabatan struktural dengan kepala UPTB H.Bachtiar, SE, MH. Namun, pada tahun 2012 terjadi perubahan jabatan struktural yang terdiri dari kepala UPTB, Sub.Bagian Tata Usaha, Seksi Pendataan dan Penetapan, Seksi Pembayaran dan Penagihan yang berlaku sampai saat ini.

2. Visi, Misi, dan Motto Kantor Samsat Polewali Mandar

Visi

“Menjadi Institusi yang responsive, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan pendapatan daerah ”.

Misi

- a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi etika profesi
- b. Melaksanakan proses administrasi kendaraan bermotor secara cepat dan tepat
- c. Mewujudkan aparat pelaksana samsat yang bersih, jujur dan cakap, bertanggungjawab serta profesional
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak
- e. Penataan arsip kendaraan yang tertib untuk memudahkan identifikasi dan keamanan dokumen

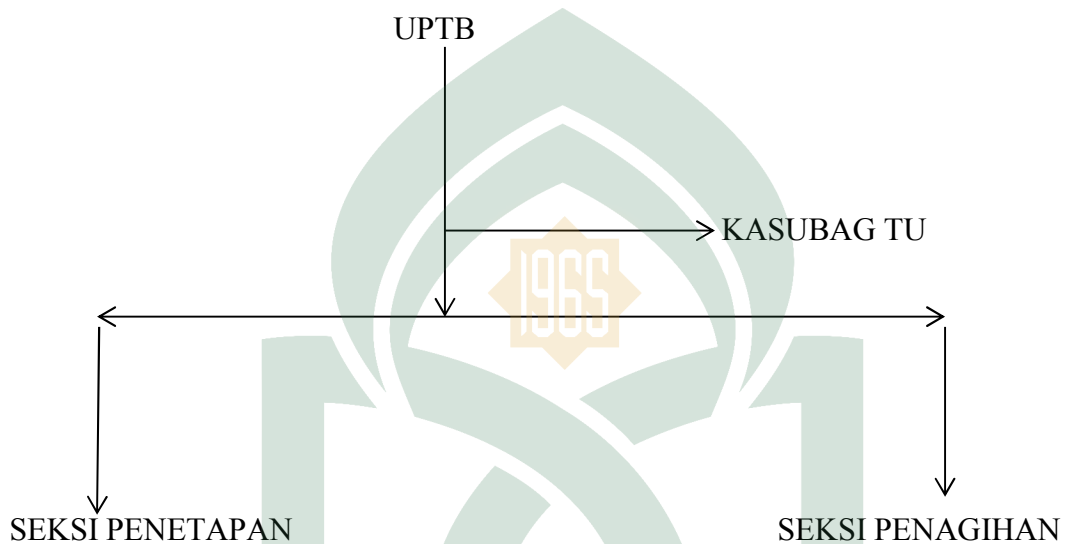
Motto

“Kepuasan Masyarakat Dalam Penyelesaian Administrasi Kendaraan Bermotor Adalah Kehormatan Bagi Kami”.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Samsat Polewali seperti gambar di bawah ini:

Gambar 4.1 *Struktur Organisasi Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar*



4. Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Samsat

Kantor bersama samsat merupakan tempat bernaungnya tiga instansi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor di daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dengan melihat kembali aktivitas Samsat, maka sesungguhnya ada dua tujuan pokok yang menjadi fungsi dari Kantor bersama Samsat, yaitu:

- a) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai pemilik kendaraan bermotor.

- b) Meningkatkan penerimaan daerah dan negara dari sektor perpajakan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Uraian tugas jabatan struktural pada Kantor Samsat Polewali Mandar:

1) Kepala UPTB

Kepala Unit Pelaksana Tehnik Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam bidang pemungutan pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawabnya dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

2) Sub Bagian Tata Usaha

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTB dalam bidang ketata usahaan, menghimpun dan mengirimkan semua laporan secara berkala seluruh kegiatan unit pajak kendaraan bermotor dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas.

3) Seksi Pendataan dan Penetapan

Seksi ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPTB dalam bidang pendaftaran, pendataan, dan penetapan Objek dan Subjek PKB, serta menyusun dan menyajikan data kendaraan yang akan berakhir masa pajaknya.

4) Seksi Penagihan.

Seksi Penagihan dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPTB dalam bidang penagihan melaksanakan

sebagian tugas UPTB dalam bidang pelayanan Pajak Daerah, membuat pembukuan data tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB), dan melakukan penagihan pasif terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB).

B. Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pemungutan Pajak Kendaraan bermotor

Sejak berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009, pajak kendaraan bermotor dialihkan ke pajak provinsi. Proses pemungutan pajak kendaraan bermotor itu sendiri dilakukan di Kantor Bersama Samsat yang melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Dinas Pendapatan Daerah, Polisi Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Kantor Samsat sendiri didirikan di setiap kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Salah satunya berada di Kabupaten Polewali Mandar. Kantor Samsat Polewali sendiri merupakan kantor Samsat ke 4 di Sulawesi Barat setelah Majene, Mamuju dan Pasangkayu

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kantor Samsat Polewali sudah sesuai dengan standar pelayanan artinya tata cara dan prosedur pelayanannya sudah sesuai dengan garis kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Kantor samsat bersama polewali mandar dalam menentukan besarnya pajak kendaraan roda dua sesuai dengan keputusan Gubernur Sulawesi barat Nomor 188.4/149/SULBAR/11/2017 tentang penetapan NJKB dapat dihitung dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{NJKB} \times \text{Bobot} \times 1,5 \%$$

Dapat dilihat dari prosedur standar yang dilakukan oleh wajib pajak adalah, pada saat jatuh tempo masa pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang tertera dalam Notice Pajak/STNK, maka wajib pajak diminta untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Dan proses pembayaran PKB, pengesahan STNK dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu jam sejak saat pendaftaran. Pajak kendaraan bermotor itu sendiri dibayar setiap tahun sekali sedangkan STNK berlaku untuk 5 (lima) tahun tetapi setiap tahun dilakukan pengesahan bersamaan dengan saat pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

a. Jumlah Wajib Pajak Kendaraan roda dua Terdaftar

Wajib pajak terdaftar merupakan masyarakat yang mendaftarkan kendaraan pribadinya di Kantor Samsat dan ini biasa dilakukan setiap pertama kali membeli kendaraan dan membuat STNK secara langsung masyarakat tersebut sudah terdaftar memiliki kendaraan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Samsat, wajib pajak terdaftar setiap tahun mengalami peningkatan . Ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 4.1 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar tahun 2011-2014

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2011	60,890
2	2012	66,604
3	2013	78,342
4	2014	85,977

(Sumber: Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa wajib pajak terdaftar terus mengalami peningkatan mulai dari tahun 2011 yang mencapai 60.890, lalu pada tahun 2012 naik menjadi 66,604, tahun 2013 mengalami peningkatan wajib pajak yang cukup signifikan mencapai 78,342 kemudian pada tahun 2014 wajib pajak terdaftar mencapai 85,977.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bagian Tata Usaha Samsat Polewali:

“Peran penting Wajib pajak terdaftar dalam penambahan pendapatan memiliki peran penting dalam penambahan pendapatan terutama dalam pajak kendaraan roda dua. Jadi penting bagi wajib pajak untuk mendaftarkan diri terutama masyarakat yang memiliki kendaraan untuk segera mendaftarkan kendaraannya tersebut di Kantor Samsat sehingga target penerimaan pajak kendaraan bermotor bisa tercapai”³⁵

Lebih lanjut Kepala Bagian Tata Usaha menjelaskan bahwa:

“Wajib pajak merupakan masyarakat yang memiliki kendaraan dengan kode DC yang terdaftar dan merupakan masyarakat yang telah terdaftar di kantor samsat polewali di luar dari kode itu berarti kendaran mereka tidak terdaftar”³⁶

Dari penjelasan di atas penulis melihat bahwa wajib pajak terdaftar adalah mereka yang memiliki kendaraan dan sudah mendaftarkan kendaraannya di Kantor Samsat Polewali karena wajib pajak mempunyai peran yang penting untuk mengukur keefektifan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat sesuai yang dikatakan oleh Kepala Bagian Tata Usaha mengatakan bahwa masyarakat yang memiliki kendaraan hendaknya segera mendaftarkan kendaraannya terutama mereka

³⁵ Wawancara dengan Dauliyah, tanggal 28 Februari 2017 di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar

³⁶ Wawancara dengan Dauliyah, tanggal 28 Februari 2017 di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar

yang memiliki kendaraan dengan kode DC sehingga semakin banyak wajib pajak terdaftar maka target penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat tercapai dan pemasukan daerah juga bertambah dan juga peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar dapat kita lihat dari tahun 2011-2014 dimana pada tahun 2014 tercatat jumlah wajib pajak terdaftar mencapai 85,977, yang meningkat dari tahun sebelumnya. Dari data tersebut dan informasi dari beberapa informan dapat kita simpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak dari tahun ke tahun semakin membaik.

b. Jumlah Kendaraan roda dua Terdaftar

Jumlah kendaraan bermotor terdaftar yang ada di Polewali Mandar tentunya setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini tentunya disebabkan karena masyarakat ingin memiliki kendaraan sendiri sehingga jumlah kendaraan yang ada di polewali mandar terus mengalami peningkatan. Kendaraan bermotor itu sendiri di bagi menjadi dua jenis yaitu Tanda Nomor Kendaraan roda dua yang berwarna hitam dan merah. Ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 Jumlah Kendaraan Bermotor Terdaftar Tahun 2011-2014

NO	TAHUN	WARNA TNKB		Jumlah
		Hitam	Merah	
1	2011	48.033	922	48.955
2	2012	53.606	993	54.599
3	2013	65.211	1105	63.316
4	2014	72.735	1178	73.913

Sumber: Kantor bersama Samsat Polewali Mandar

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yang terdiri dari 2 jenis tanda nomor kendaraan bermotor yaitu hitam dan merah .Ini diperjelas oleh Kasubag Samsat Polewali mengatakan:

“Setiap tahun jumlah kendaraan terdaftar yang berada di daerah Polewali Mandar terus mengalami peningkatan, itu diluar dari kode tanda kendaraan bermotor untuk wilayah yang ada di Polewali baik yang tanda nomor kendaraan bermotor warna hitam, merah dan kuning semuanya terus meningkat.”³⁷

Lebih lanjut Kasubag Samsat Polewali mengatakan bahwa:

“Jenis kendaraan bermotor yang terdaftar sendiri didominasi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang berwarna hitam karena masyarakat lebih cenderung ingin memiliki kendaraan pribadi dan juga banyak masyarakat kita yang memiliki kendaraan lebih dari satu sehingga jumlah kendaraan tersebut setiap tahun terus mengalami peningkatan.”³⁸

³⁷ Wawancara dengan Dauliyah, tanggal 28 Februari 2017 di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar

³⁸ Wawancara dengan Dauliyah, tanggal 28 Februari 2017 di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar

Hal ini dibenarkan oleh Staf Bagian Pendataan mengatakan bahwa:

“jumlah kendaraan yang terdaftar di kantor samsat setiap tahun terus meningkat karena banyak masyarakat yang sudah memiliki kendaraan pribadi lalu mendaftarkannya di kantor samsat dan yang paling banyak itu tanda nomor kendaraan berwarna hitam yang terdaftar.”.³⁹

Dari penjelasan diatas penulis melihat bahwa jumlah kendaraan bermotor yang ada di Polewali Mandar terus mengalami peningkatan dapat dilihat pada tahun 2014 jumlah kendaraan yang ada di Polewali mencapai 85,977 unit. Sesuai dengan penuturan informan diatas bahwa untuk jumlah kendaraan yang terdaftar tentunya setiap tahun meningkat ini disebabkan karena tingginya antusias masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi.

2. Alur pembayaran pajak kendaraan bermotor

Kantor samsat bersama polewali mandar memberikan kemudahan bagi para wajib pajak yang ingin membayar pajak kendaraannya guna memaksimalkan penerimaan pajak di mana memberikan syarat yang mudah dengan hanya membawa :

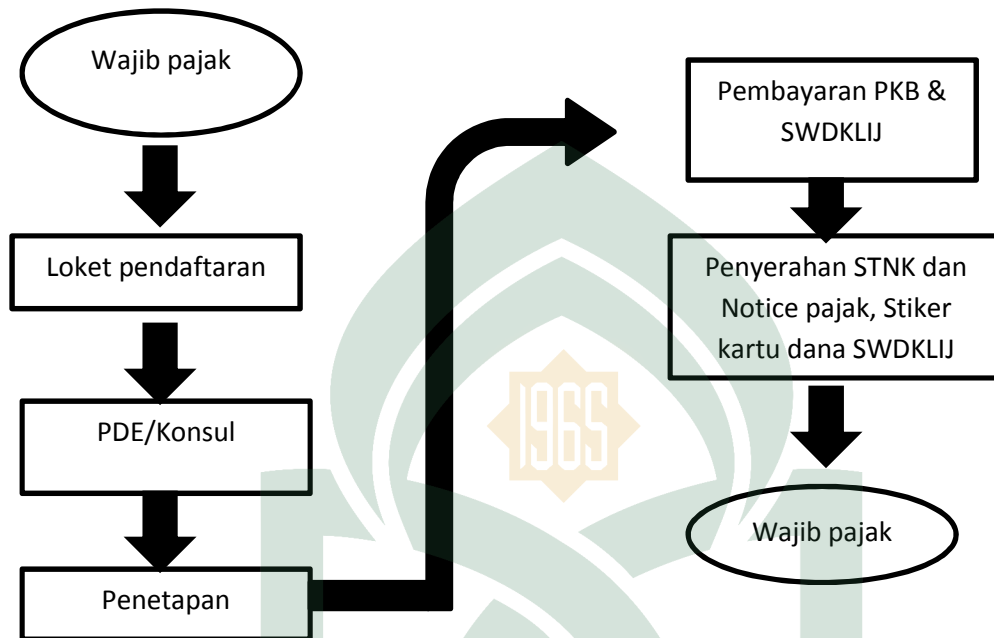
- a. STNK asli
- b. Foto copy STNK
- c. Foto copy KTP

Adapun alur pembayaran pajak tahunan kendaraan roda dua dapat dilihat dari bagan di bawah ini ;

³⁹ Wawancara dengan Rahmat, tanggal 28 Februari 2017 di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar

Gambar 4.2 Alur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat

Polewali Mandar



Dari gambar di atas dapat dilihat masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraannya wajib membawa STNK asli, Foto copy KTP dan Foto Copy STNK. Selanjutnya berkas yang telah disiapkan tadi di bawa ke loket pendaftaran lalu diserahkan ke pihak PDE (pengelola data elektronik) atau biasa disebut konsul untuk dilakukan penetapan pajak dan denda pajak jika terlambat kemudian dibawa ke kasir melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan SWDKLIJ lalu, penyerahan kembali STNK kepada wajib pajak yang bersangkutan. Selanjutnya apabila ada wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan roda duanya alur pembayarannya sama dengan alur yang dijelaskan di atas hanya ada dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% setiap bulannya dari nilai pokok pajak, kemudian dari jumlah denda yang

didapat dijumlahkan bersama nilai pokok pajak. Jadi dana denda tetap di bayar bersama pajak kendaraan itu sendiri.

a. Jumlah kendaraan motor terbayar

Jumlah kendaraan terbayar merupakan kendaraan yang pajak kendaraannya telah dilunasi tepat waktu oleh wajib pajak/pemilik kendaraan. Berikut data kendaraan yang terbayar:

Tabel 4.3 Jumlah Kendaraan Terbayar Tahun 2011-2014

No	Tahun	Jumlah
1	2011	37,016
2	2012	38.544
3	2013	38.593
4	2014	39.241

Sumber: Kantor Bersama samsat Polewali Mandar

Dari data diatas dapat dilihat bahwa setiap tahun jumlah kendaraan yang terbayar mengalami peningkatan . Jumlah kendaraan roda dua merupakan kendaraan yang paling banyak pemasukannya karena banyak masyarakat yang memiliki kendaraan roda dua . Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Samsat Polewali Mandar bahwa:

“Untuk jumlah kendaraan terbayar itu sendiri merupakan wajib pajak yang tepat waktu membayar pajak kendaraan bermotornya di kantor samsat sehingga jumlah kendaraan yang pajaknya telah lunas itu terus meningkat dan yang paling banyak itu nak kendaraan roda dua karena rata-rata masyarakat disini lebih banyak memiliki kendaraan roda dua.”⁴⁰

⁴⁰ Wawancara dengan Dauliyah, tanggal 28 Februari 2017 di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar

Hal yang sama juga dikatakan oleh Staf Pendataan Kantor Samsat bahwa:

“Jumlah kendaraan terbayar itu sendiri nak merupakan wajib pajak yang tepat waktu membayar pajak kendaraannya makanya setiap tahun itu penerimaan pajak kendaraan yang terbayar terus mengalami peningkatan”.⁴¹

Dari hasil di atas penulis melihat bahwa jumlah kendaraan yang pajaknya terbayar mengalami peningkatan dari kendaraan roda dua, Sesuai dengan penuturan informan diatas bahwa kendaraan yang pajaknya sudah terbayar merupakan wajib pajak yang tepat waktu dalam membayar pajak kendaraannya. Oleh karena itu, wajib pajak dihimbau untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu agar target penerimaan pajak kendaraan dapat tercapai.

b. Jumlah kendaraan motor menunggak

Banyaknya kendaraan yang menunggak disebabkan oleh wajib pajak yang lambat membayar pajak kendaraannya, sehingga dalam hal ini dilakukan pemberian bunga setiap bulannya ketika melakukan pembayaran pajak kendaraan yang sudah lewat dari tanggal yang ditetapkan.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Bagian Tata Usaha Samsat mengatakan bahwa:

“Faktor utama yang menyebabkan masih banyak masyarakat yang menunggak atau lambat dalam pembayaran pajak karena banyak diantara masyarakat yang lokasi rumahnya jauh dari kantor samsat ada yang tinggal di pegunungan sampai di pelosok yang memerlukan waktu sampai berjam-jam bahkan lebih untuk sampai di kantor dalam membayar pajak sehingga mereka menunggak

⁴¹ Wawancara dengan Rahmat, tanggal 28 Februari 2017 di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar

dalam pembayaran pajak dengan alasan tempat tinggal mereka jauh dari lokasi kantor samsat⁴²

Alasan lain yang menyebabkan banyak wajib pajak yang terkena denda adalah faktor ekonomi. Karena beberapa orang di daerah-daerah pelosok yang berstatus kurang mampu yang kemudian untuk membayar pajak kendaraannya masyarakat masih belum mampu ditambah lagi faktor pendidikan dan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu yang perlu ditingkatkan

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian tata usaha samsat dapat dipahami bahwa samsat menyadari alasan keterlambatan wajib pajak dalam membayar pajaknya, namun hukum tetap berlaku sehingga wajib pajak dikenakan denda berdasarkan aturan denda pajak yaitu dikenakan denda 2% dari pokok pajak.

Faktor pendukung banyaknya masyarakat yang di denda selain karena lokasi dari kantor samsat yang jauh juga perilaku masyarakat yang terlanjur terlambat membayar pajak kendaraannya sudah tidak mau untuk membayar di tahun selanjutnya karena mereka beranggapan bahwa lebih baik mereka menunggu sampai adanya keputusan dari gubernur untuk pengampunan denda pajak yang mana pengampunan ini memang biasa dilakukan apabila melihat penerimaan pajak kendaraan bermotor mulai menurun.

⁴² Wawancara dengan Dauliyah, tanggal 28 Februari 2017 di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar

c. Penentuan denda pajak kendaraan bermotor di kantor samsat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Tata Usaha atas nama Dauliyah, S.Sos menjelaskan bahwa:

“dalam hal ini pihak samsat sudah mengambil tindakan dengan memberikan denda sebesar 2 persen kepada wajib pajak yang lambat membayar pajak. Sesuai dengan surat keputusan Gubernur Sulawesi barat no 188.4/149/Sulbar/11/2017, untuk denda keterlambatan diberikan sanksi sebesar 2 persen perbulannya dan kenaikan 2% tiap bulan jika terlambat lebih dari satu bulan, dari pokok pajak hal ini di dukung oleh beberapa wajib pajak”⁴³

Dari hasil wawancara diatas denda pajak dapat disimpulkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.4 Penentuan Denda Pajak

BULAN	DENDA PAJAK
Pertama	2 %
Kedua	4%
Ketiga	6%
Keempat	8%
Kelima	10%
Keenam	12%
Ketuju	14%
Kedelapan	16%
Kesembilan	18%
Kesepuluh	20%
Kesebelas	22%
Keduabelas	24%

Sumber: olahan sendiri

⁴³ Wawancara dengan Dauliyah, tanggal 28 Februari 2017 di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar

Adapun hasil wawancara wajib pajak kendaraan roda dua oleh Bapak Ardi yang menunggak pajak kendaraannya mengatakan bahwa:

“Alasan saya lambat bayar pajak karena saya sibuk berkebun kemudian saya juga tinggal di gunung jadi memerlukan waktu perjalanan yang lama untuk sampai ke kantor samsat untuk bayar pajak”⁴⁴

Hal yang sama juga dikatakan oleh seorang wajib pajak Bapak Nurdin yang juga menunggak membayar pajak kendaraan bahwa:

“saya sudah 3 bulan tidak bayar pajak karena saya sibuk dan juga lokasi kantor samsat jauh dari tempat tinggal saya “ perlu waktu hampir 2 jam untuk sampai di sini makanya saya lambat bayar pajak”⁴⁵

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh informan atas nama pak Ardi dan Pak Nurdin yang tidak membayar pajak atau terlambat membayar pajak disebabkan karena faktor kemalasan membayar pajak oleh wajib pajak, karena dengan meninjau alasannya yang mengatakan bahwa jarak kantor samsat cukup jauh dengan menempuh dua jam perjalanan ditambah lagi dengan alasan kesibukan, sementara samsat memberikan cukup banyak keringan dalam tenggang waktu pembayaran pajak selama satu tahun sekali. Ada lagi kemudahan yang diberikan oleh kantor samsat Polewali mandar dengan menyediakan kendaraan samsat keliling dan juga serambi samsat yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang lokasi rumahnya jauh dari kantor samsat Polewali mandar. Hal ini bisa dikatakan bahwa wajib pajak tidak

⁴⁴ Wawancara dengan Ardi, tanggal 28 Februari 2017 di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar

⁴⁵ Wawancara dengan Nurdin, tanggal 28 Februari 2017 di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar

patuh dalam pembayaran pajak, yang dimana tidak hanya melanggar aturan undang undang namun juga melanggar prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip tauhid dan akhlak

Dari penjelasan diatas yang diberikan oleh semua key informan, penulis melihat bahwa alasan utama masyarakat banyak yang menunggak bayar pajak karena tempat tinggal mereka yang jauh dari lokasi kantor samsat sehingga wajib pajak tidak tepat waktu melakukan pembayaran pajak kendaraan dan juga banyak masyarakat yang tidak melaporkan kendaraan bermotornya di Kantor Samsat apabila sudah berpindah tangan sehingga data yang ada di Kantor Samsat mengenai wajib pajak atas kepemilikan kendaraan yang menunggak bisa diperbaharui. Dari sini penulis melihat bahwa sebagian wajib pajak daerah Polewali Mandar masih kurang peka dalam hal ini membayar pajak kendaraan tepat waktu sehingga dibutuhkan kesadaran sendiri bagi wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu ketika sudah jatuh tempo.

C. Analisis Penentuan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Prinsip Islam

Denda pajak sebelumnya telah diketahui oleh wajib pajak saat mereka mulai mendaftarkan motornya di kantor Samsat Polewali mandar. Dimana artinya mereka telah menyepakati ketentuan- ketentuan maupun persyaratan yang akan timbul nantinya yang akan di keluarkan oleh pemerintah dan kantor Samsat. Dalam banyak ayat dan hadits, kita dapatkan perintah untuk memenuhi perjanjian, transaksi, dan persyaratan, serta menunaikan amanah. Jika memenuhi dan memperhatikan perjanjian secara umum adalah perkara yang diperintahkan, maka bisa ditarik

kesimpulan bahwa hukum asal transaksi dan persyaratan adalah sah. Makna dari sahnya transaksi adalah maksud diadakannya transaksi itu terwujud, sedangkan maksud pokok dari transaksi adalah dijalankan. Pemanfaatan dana denda sendiri denda pajak sendiri di Kantor Samsat tidak diselewengkan karena denda pajak itu masuk bersama nilai pokok pajak itu sendiri yang mana pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak.

Sama seperti dalam aktifitas perbankan Dewan Syariah Nasional memperbolehkan menggunakan denda keterlambatan pembayaran pada kartu kredit syariah. Ini dapat dilihat dari fatwa DSN MUI No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah card , pada ketentuan keenam poin “b” disebutkan bahwa penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Penentuan denda pajak di kantor samsat sudah sesuai dengan SK Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 188.4/149/SULBAR/11/2017 tentang penetapan NJKB yang dimana menetapkan denda pajak sebanyak 2% dari Pajak pokok. Untuk lebih jelasnya dalam penentuan denda pajak dapat dilihat ilustrasi perhitungan denda pajak oleh Mufli dan Fathir dengan merek dan tipe yang berbeda dan jangka waktu keterlambatan tidak sama.

1. Ilustrasi perhitungan denda pajak oleh Mufli

“wajib pajak kendaraan bermotor roda dua atas nama Mufli dengan merek motor SUZUKI/FL 125RCD dikenakan pajak Rp. 166.500,- namun terlambat membayar

pajak selama 3 bulan yang mana dendanya sama dengan 6%” maka perhitungan denda pajaknya adalah:

$$\begin{aligned}\text{Denda pajak} &= 6\% \times 166.500 \\ &= \text{Rp. 9.990}\end{aligned}$$

2. Ilustrasi perhitungan denda pajak oleh Fathir

“wajib pajak kendaraan bermotor roda dua atas nama Fathir dengan merek motor YAMAHA 5 TP JUPITER Z/FK dengan bobot 110 cc dikenakan pajak Rp. 121.500,- namun terlambat membayar pajak selama 3 bulan di mana denda pajaknya adalah 6%” maka perhitungan denda pajaknya adalah:

$$\begin{aligned}\text{Denda pajak} &= 6\% \times 121.500 \\ &= \text{Rp. 7.290.-}\end{aligned}$$

Benang merah Dari dua ilustrasi diatas bahwa denda pajak yang dibayar oleh Mufli sebanyak Rp. 9.990,-dengan keterlambatan 3 bulan sedangkan yang dibayar oleh Fathir dengan keterlambatan yang sama yaitu selama 3 bulan dikenakan denda sebanyak Rp. 7.290,-

Ilustrasi kantor samsat tersebut sudah sesuai dengan SK Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/149/SULBAR/11/2017 tentang penetapan NJKB, namun jika dibandingkan prinsip Islam dapat dilihat dengan analisis berikut ini yang berdasarkan pada prinsip Tauhid, Ahklak, dan Keseimbangan.

a. Tauhid

Ulama mazhab Hambali termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauzilah, mayoritas ulama mazhab Maliki, ulama mazhsab Hanafi dan sebagian

ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana ta'zir. apabila menurut pertimbangan mereka hukuman denda itulah yang tepat diterapkan kepada pelaku pidana. Salah satu dasar yang mereka pakai adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta. dengan berdasarkan pada hadist Rasulullah SAW bersabda:

يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَائِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤَجَّرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرُ إِبِلِهِ
عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا (رواه النسائي)

“siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh akan menerima imbalan pahalanya dan siapa yang enggan membayarnya saya akan mengambilnya serta mengambil sebahagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari Tuhan kami (HR An Nasa'i)⁴⁶ .

Menurut mereka hadis ini secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat/ Pajak

Berdasarkan pandangan diatas dapat disimpulkan denda diperbolehkan selama objek yang dikenakan denda sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat dalam hal ini adalah zakat/pajak. Jika ditinjau dari denda yang diterapkan di kantor samsat, dimana objek dari denda tersebut adalah pajak, dan pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur selain itu pembayaran pajak juga terdapat pada zaman Rasulullah, jadi dengan berdasarkan pada pandangan mazhab Hambali denda pajak

⁴⁶ Jalalluddin As-Suyuti, Sunan AN-Nasa'i, jilid: IV, (Beirut: Darul Qutub Ulumiah, t.,) h, 85.

dikantor samsat boleh dalam syariat Islam. Prinsip tauhid memberikan pengertian bahwa masyarakat sebagai wajib pajak harus memenuhi kesepakatan yang telah ditentukan bersama kantor samsat. Sanksi denda yang diberikan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajaknya dalam hukum Islam adalah boleh dilakukan kepada wajib pajak yang mampu membayar pajaknya tapi menunda pembayaran karena sengaja. Hal tersebut merupakan suatu kezholiman dan merugikan pihak pemerintah.

Ulama imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad Bin Hasan As-syaibani serta sebagian ulama dari mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana ta'zir. Dengan berdasarkan pada hadits yang mengatakan bahwa

“Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat”(HR Ibnu Majah)⁴⁷

Berdasarkan pandangan ulama di atas bahwa denda tidak diperbolehkan dalam syariat Islam, karena pada harta seseorang jika dikenakan denda akan melahirkan harta yang baru yang dimiliki oleh orang lain. Tetapi jika dibandingkan dengan denda yang diberikan oleh kantor samsat polewali mandar di mana dana denda itu sendiri tidak menjadi hak pribadi, melainkan diberikan kepada pemerintah sebagai amirul mukminin untuk kemudian di kembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan di mana kesemuanya itu

⁴⁷ http://eprints.walisongo.ac.id/3084/5/2105190_Bab4.pdf di Akses pukul 22.31

adalah untuk kepentingan bersama. Dalam hal ini denda diperbolehkan karena dana denda itu sebagai peringatan atau pemberi pelajaran kepada wajib pajak agar patuh membayar pajak kendaraanya sebagaimana yang telah di perintahkan.

b. Akhlak/ keikhlasan

Akhlak adalah suatu system nilai yang mengatur tindakan dan pola sikap manusia di muka bumi . Denda pajak yang diterapkan di kantor samsat tidak ada unsur pemaksaan melainkan kerelaan karena wajib pajak sebelumnya telah mengetahui bahwa setelah mereka mendaftarkan kendaraannya maka mereka mempunyai kewajiban untuk membayar pajak kendaraan roda duanya setiap tahun atau dengan kata lain wajib pajak menerima adanya denda pajak meskipun sebagian yang lain tidak setuju dengan adanya denda pajak. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rina.

“denda pajak itu penting diterapkan agar wajib pajak patuh bayar pajak dan pembangunan infrastruktur pun berjalan dengan lancar”⁴⁸

Hal yang lain diungkap oleh ibu Zaskia bahwa

“denda pajak sepertinya tidak perlu karena sebagian yang penghasilan ekonomi kebawah akan merasa berat membayarnya, pajak saja sudah terasa berat ditambah lagi denda akan semakin merasa berat”⁴⁹

Jadi analisis dari pendekan akhlak ini, denda pajak harus ada agar wajib pajak tetap patuh dalam membayar pajak yang telah ditentukan dan di sepakati

⁴⁸ Wawancara dengan Rina, tanggal 1 Maret 2017 di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar

⁴⁹ Wawancara dengan Zaskia, tanggal 1 Maret 2017 di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar

sebelumnya karena dana denda itu sendiri di gunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti membangun infrastruktur dan untuk biaya dana kesehatan dana pendidikan. Artinya penerapan denda berkaitan dengan prinsip ekonomi islam adalah sesuai karena pajak itu sendiri digunakan untuk ke maslahatan bersama. Bagi wajib pajak yang sengaja menunda pembayaran pajaknya ini dalam hukum Islam adalah suatu kedzaliman.

Dari pihak Pemerintah sendiri dan kantor samsat sebenarnya telah melakukan upaya –upaya agar masyarakat yang sudah terlanjur telat membayar pajak kendaraannya di bebaskan dari hukuman denda seperti pengampunan pajak yang sesekali dilakukan oleh pihak pemerintah apabila melihat partisipasi masyarakat membayar pajak mulai berkurang. Artinya pihak pemerintah mempunyai itikad baik dengan memberikan pengampunan kepada yang sudah lama terlambat membayar pajaknya.

c. Keseimbangan/ keadilan

Adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (al-musâwah). Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran. Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.⁵⁰

⁵⁰.Ahmad Azhar Basyir, Negara dan Pemerintahan dalam Islam, UII Pres, Yogyakarta, 2000, h. 30

Denda pajak dalam Islam wajib di bayar karena pada prinsipnya pajak itu adalah kewajiban bagi setiap masyarakat yang mempunyai kendaraan roda dua, tetapi yang tidak sesuai adalah cara penentuan denda pajak di kantor samsat itu sendiri. seperti Hadist Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda yang artinya :

“Kaum muslimin itu berkewajiban melaksanakan persyaratan yang telah mereka sepakati.” (Hr. Abu Daud dan Tirmidzi)⁵¹

Denda pajak di kantor samsat untuk melihat keseimbangan atau keadilannya dapat dianalisis dari hasil wawancara Kepala kasubag atas nama Dauliyah, S.Sos yang mengatakan

“denda pajak itu kalau telat satu hari tetap dihitung satu bulan ataupun lewat dua atau tiga hari tetap sebulan dimana denda tersebut ditambahkan 2% dari nilai pokok pajak kendaraan roda dua”⁵²

Jika dianalisis perkataan Ibu Dauliyah diatas berarti terjadi unsur ketidakadilan dalam penentuan membayar denda pajak karena wajib pajak yang terlambat satu hari membayar pajak sama jumlah denda yang dibayar oleh wajib pajak yang terlambat 30 hari.

Hal ini dapat dilihat dari hasil ilustrasi perhitungan denda pajak yang terlambat membayar pajak.

⁵¹ <https://alsofwah.or.id/cetakekonomi.php?id=142&idjudul=1> Hikmah-al-quran-dan-mutiara-hadist di akses pada pukul 20.41 tanggal 8 September 2016.

⁵² Wawancara dengan Dauliyah, tanggal 28 Februari 2017 di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar

1) Ilustrasi perhitungan denda pajak oleh Kurnia

“wajib pajak kendaraan bermotor roda dua atas nama Kurnia dengan merek motor SUZUKI/FK 110 SCD dikenakan pajak Rp. 130.500,- namun terlambat membayar pajak selama 2 hari yang langsung di hitung selama 1 bulan yang denda pajaknya adalah 2 %” maka perhitungan denda pajaknya adalah:

$$\begin{aligned}\text{Denda pajak} &= 2\% \times 130.500 \\ &= \text{Rp. 2.600}\end{aligned}$$

2) Ilustrasi perhitungan denda pajak oleh Hasruddin

“wajib pajak kendaraan bermotor roda dua atas nama Hasruddin dengan merek motor SUZUKI/FK 110 SCD dikenakan pajak Rp. 130.500,- namun terlambat membayar pajak selama 29 hari yang perhitungannya juga satu bulan dan dikenakan denda sebesar 2%” maka perhitungan denda pajaknya adalah:

$$\begin{aligned}\text{Denda pajak} &= 2\% \times 130.500 \\ &= \text{Rp. 2.600.-}\end{aligned}$$

Dari ilustrasi diatas dapat ditemukan unsur ketidakadilan karena denda pajak yang dibayar oleh Kurnia yang terlambat 2 hari sama dengan denda pajak yang dibayar oleh Hasruddin yang terlambat 29 hari. Dengan demikian hasil analisis dengan pendekatan keadilan tidak sesuai dengan prinsip Islam karena ketidakadilan dilarang dalam prinsip Islam.

Jadi jika ditarik benang merah dari analisis denda pajak pada kantor samsat sudah sesuai SK Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 188.4/149/SULBAR/11/2017 namun tidak sesuai dengan prinsip Islam karena tidak memenuhi syarat ketidakadilan,

pemerintah harus membedakan denda pajak yang terlambat satu hari, dua hari dan selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembayaran denda pajak kendaraan roda dua di kantor samsat dilakukan bersamaan dengan pembayaran pokok pajak kendaraan roda dua. Dengan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% setiap bulannya dari nilai pokok pajak, kemudian dari jumlah denda yang didapat dijumlahkan bersama nilai pokok pajak. Jadi dana denda tetap di bayar bersama pajak kendaraan itu sendiri.
2. Penentuan denda pajak di kantor samsat tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena tidak memenuhi salah satu dari ketiga prinsip dalam ekonomi islam yaitu syarat ketidakadilan yang termasuk dalam prinsip ekonomi Islam dimana denda pajak yang terlambat kurang dari 30 hari sama dengan denda pajak bulanan. Perilaku masyarakat yang tidak patuh membayar pajak kendaraanya disebabkan karena faktor kemalasan di mana pembayaran pajak kendaraan itu hanya setiap 1 kali setahun

B. Saran

1. Bagi pemerintah yang menetapkan sistem penentuan denda pajak harus ditetapkan berdasarkan keadilan yang adalah ekonomi Islam
2. Pemerintah harus membedakan denda pajak harian dan bulanan
3. Melihat wajib pajak yang kebanyakan terlambat membayar pajak agar ditimbulkan kesadarannya dalam membayar pajak, karena biar bagaimanapun pajak pada dasarnya pajak adalah kewajiban setiap masyarakat yang

mempunyai kendaraan roda dua dan juga pajak itu bermanfaat buat wajib pajak juga yang dimana digunakan untuk pembangunan infrastruktur misalnya pendidikan, kesehatan, jalan umum serta kesejahteraan masyarakat.



KEPUSTAKAAN

- Abduh Muhammad “Risalah Tauhid, 1978(Jakarta:Bulan Bintang)
- Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ali Muruddin, Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),
- Arfa Ananda Faisar “Denda Sebagai Alternatif Hukuman (Kajian Hukum Islam kontemporer) *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 16, No. 1, Mei 2014
- Arum Harjanti Puspa Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah Kpp Pratama Cilacap) 2012
- Rahnman Abdul.Mengukur dampak sistrem administrasi perpajakan modern terhadap kapatuhan perpajakan dengansanksi pajak,Moral Pajak, dan pelayanan sebagai variabel Perantara, *Jurnal Administrasi Negara*,Volume 20 Nomor 3 desember 2014 /115-125 2014
- As-Sarahsi, Al-Mabsuth, Dalam Yahya Abdurrahman, Dhariba(Pajak), [Http:// Asy-Syawkani](http://asy-syawkani.com), Fath al-Qadir, 3/493, Dalam Yahya Abdurrahman
- Azhar Adiwarmanto Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, edisi ketiga, Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, 2008
- Bagong Suyanto, Metode Penelitian Sosial, Jakarta: Kencana, 2010.
- Basrowi dan Suwandi, Mamahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Basyir Azhar , Negara dan Pemerintahan dalam Islam, UII Pres, Yogyakarta, 2000.
- Bird M Richard ,“Improving Tax Administration in Developing Countries, *Journal of Tax Administration* Vol 1.1(2015)
- Eko Agung Purwana, Kesejahtraan dalam Perspektif Ekonomi Islam, Ponorogo: Justitia Islamica, 2014
- Gusfami, Pajak Menurut Syariah, Jakarta: PT Rajagrafindo Perkasa, 2011.

- <http://www/Prinsip-PrinsipIslamDalamKehidupanVOA-ISLAM.COM.html.dpbs>
- <http://djafa.org/id/infosamsat-pengertian-samsat/> 15-september-2016 pukul 15.00
- <http://ekonomisyariat.com/denda-dalam-kacamata-syariah/> 09 sep 2015
- http://eprints.walisongo.ac.id/3084/5/2105190_Bab4.pdf di Akses pukul 22.31
- <http://gudangilmusyariah.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-dendadalam-perspektif-islam.html>.
- <http://tebuieng.org/denda-telat-bayar-hutang/tanya-jawab-agama.html>,di akses pada jam 20.58 pada tanggal 8 sep 2016Xii.
- <http://www.alsofwa.com/3864/142-ekonomi-hukum-denda.html> 25-7-2016 pukul 20.22wita
- Kementrian Agama, Al Quran Keluarga, (Bandung: CV MediaFitrahRabbani,2012)
- Kuncoro Mudjarad, Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi edisi ke 3, Jakarta: Penerbit Erlangga 2009.
- Mudjad Mahalli Ahmad , Hadis-hadis Muttafaq ‘Alaih”, 2004 (Jakarta: Prenada Media) h. 108
- Muhammad,”AspekHukum Dalam Muamalat,(Yogyakarta: Graham Ilmu,2007),h .158
- Munawwir. A.W, Kamus Al- Munawwir, Surabaya: Pustaka progresif ,bab Dharabah, 2002
- Pradanata, Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan Dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu, Skripsi, Malang, 2014.
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam P3EI ,Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerjasama Dengan Bank Indonesia, “Ekonomi Islam,” Jakarta: Rajawali Press 2014.
- Qardlawi Yusuf, “Hukum Zakat”, Jakarta: Pustaka Litera InterNusa, 1997
- Rochmat Soemitro, Dasar – Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, Perpajakan Indonesia, Jakarta : Salemba Empat, Jakarta, 2003.

- Rochmat Soemitro, Dasar-Dasar Hukum Pajak Dana Pajak Pendapatan 1994, Jakarta; PT . Eresco, cet;VIII, 1977.
- Santi, Rosalina. 2010. Perbedaan Perilaku Etis Auditor di KAP dalam Etika Profesi berdasarkan Locus Of Control dan Gender. Skripsi. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas
- Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D,” Bandung: Alfabeta 2013.
- Sulud Kahono, Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : studi empiris di wilayah kp pbb semarang, tesis Semarang :Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang 2003.



Riwayat Hidup



Nama : Fahri
 TTL : Polewali/ 03 Juli 1994
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Alamat : BTN Saumata Indah Blok i

Penulis bernama lengkap Fahri lahir di Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, pada tanggal 03 Juli 1994 merupakan anak ke 7 dari 8 bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri, bapak Musrah dan Ibu Nuriana. Penulis sekarang bertempat tinggal di BTN Saumata Indah Blok I Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

Penulis menyelesaikan pendidikan Formal di SD N 023 Dara' di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat dan lulus pada tahun 2006, Kemudian lanjut di SMP N 3 Polewali, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat lulus pada tahun 2009, Lalu melanjutkan di SMA N 3 Polewali Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat lulus pada tahun 2012. Setelah Tamat di tahun 2012 penulis hijrah ke Propinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Makassar untuk melanjutkan perguruan tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi S1 Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, penulis menyelesaikan Magang di Bank BTN Syariah pada tahun 2015 dan menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di tahun 2016, dan sampai Kemudian penulis di wisuda pada tahun 2017 dan memperoleh gelar S.E



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

NAMA :

INSTANSI :

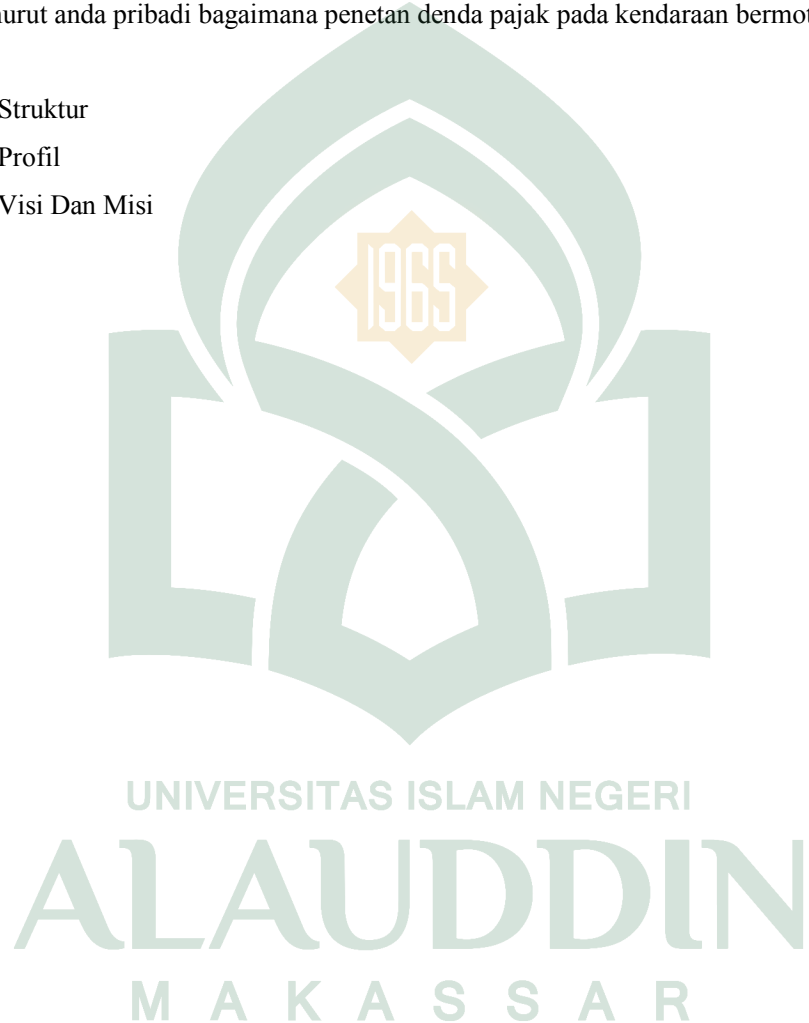
JABATAN :

**Praktek Pungutan Denda Pajak dalam Perspektif Islam di
Kantor Samsat Polewali Mandar pada Kendaraan Roda Dua**

1. Bagaimana syarat dan alur pengurusan pembayaran pajak roda dua di kantor samsat polman ?
2. Berapa banyak jumlah kendaraan roda dua di Polewali mandar yang terdaftar sebagai wajib pajak, Kemudian seberapa penting peran wajib pajak ?
3. Bagaimana Kantor samsat polman menentukan besarnya pajak setiap kendaraan roda dua ?
4. Apakah semua kendaraan yang terdaftar patuh membayar pajak ? dan bagaimana peningkatannya ?
5. Apa yang menyebabkan pajak tiap kendaraan berbeda ?
6. Apa yang melatar belakangi sehingga harus ada denda bagi wajib pajak yang terlambat bayar pajak kendaraannya?
7. Bagaimana metode penaksiran yang dilakukan kantor samsat dalam menentukan besarnya denda yang diterima oleh wajib pajak yang terlambat membayar pajaknya ? apa yang membuat tiap motor berbeda pajaknya
8. Berapa banyak kendaraan yang terkena sanksi karena terlambat bayar pajak ?
9. Bagaimana praktek transaksi pembayaran kendaraan roda dua yang terlambat bayar pajak ?
10. Bagaimana pengelolaan dana hasil denda pajak kendaraan roda dua ?
11. Apakah ada jenis sanksi lain yang diberikan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajaknya ?

12. Adakah keringanan yang diberikan kepada para wajib pajak yang sudah terlanjur terlambat membayar pajaknya dan Apa upaya yang dilakukan oleh kantor samsat polman sehingga wajib pajak yang sudah terlambat membayar pajak kendaraanya segera melunasi pajak kendaraannya ?
13. Bagaimana pembagian hasil penerimaan pajak ?
14. Menurut anda pribadi bagaimana penetan denda pajak pada kendaraan bermotor?

- Struktur
- Profil
- Visi Dan Misi



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

NAMA :

PEKERJAAN:

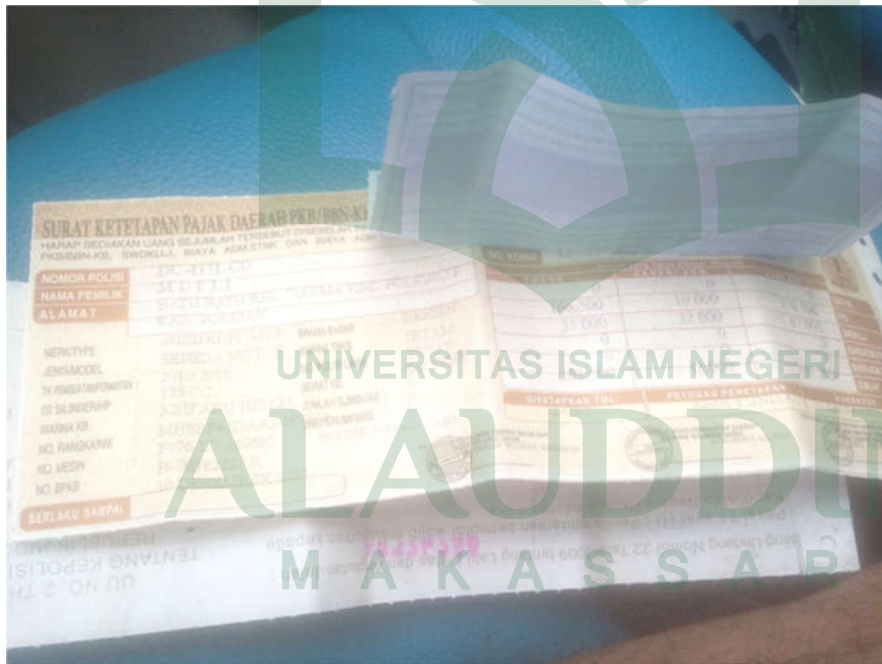
Pertanyaan Untuk Wajib pajak.

1. Apa Persyaratan yang perlu di bawa saat membayar pajak ?
2. Apa alasan bapak/ibu terlambat membayar pajak?
3. Apakah bapak/ibu merasa terbebani dengan denda yang di berikan oleh kantor samsat apabila terlambat membayar pajak ?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Daftar Informan Wawancara

NO	NAMA	TANGGAL WAWANCARA	PEKERJAAN/JABATAN
1	Dauliyah.S.Sos	28 Februari 2017	KASUBAG TATA USAHA UPTB SAMSAT POLMAN
2	Rahmat.S.Kom	28 Februari 2017	Pegawai Samsat Polman
3	Nurdin	28 Februari 2017	Petani
4	Ardi	28 Februari 2017	Petani
5	Rina	1 Maret 2017	Pedagang
6	Zaskia	1 Maret 2017	IRT









PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) SAMSAT POLMAN
Jalan H.Andi Depu No. 151 Telp/Fax (0428) 21587

SURAT KETERANGAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

N A M A : **DAULIYAH,S.Sos**
NIP : 19760401 200604 2 040
PANGKAT/GOL.RUANG : Penata /III.c
JABATAN : Kasubag Tata Usaha UPTB Samsat Polman

Menerangkan bahwa benar yang tersebut di bawah ini :

NAMA : **FAHRI**
NIM : 10200112058
FAKULTAS/JURUSAN : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI ISLAM
PERGURUAN TINGGI : UIN ALAUDDIN MAKASSAR

telah melakukan pengambilan data dan Penelitian di Kantor UPTB Samsat Polman dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul " PRAKTEK PUNGUTAN DENDA PAJAK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM"

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. **KEPALA UPTB SAMSAT POLMAN**
KASUBAG TATA USAHA,

DAULIYAH,S.Sos

Pangkat : Penata/ III.c

Nip. : 19760401 200604 2 040



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 670 TAHUN 2017**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan : Fahri
NIM : 10200112058
Tanggal : 05 April 2017
Mahasiswa Jurusan : Ekonomi Islam
Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul **"Praktek' Pungutan Denda Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus kendaraan Roda Dua pada Kantor Samsat Polewali mandar)"**
- Menimbang : 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/ Munaqasyah
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk panitia ujian.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI. No. 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
6. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).
8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 241 B Tahun 2010 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia Ujian Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
Sekretaris : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
Penguji I : Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si. Ak.
Penguji II : Dr. Syaharuddin, M.Si.
Pembimbing I : Dr. Rahmawati Muin, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Amiruddin K., M.El.
Pelaksana : Roshani

2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/Munaqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 05 April 2017

Dekan,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

Nomor : **2239**/EB.1/PP.00.9/2016
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : **Undangan Ujian Munaqasyah**

Samata, **06** April 2017

Kepada Yth

Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing
Di-

Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Ujian
Munaqasyah Mahasiswa:

Nama : Fahri
NIM : 10200112058
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : "Praktek Pungutan Denda Pajak dalam Perspektif Ekonomi
Islam (Studi Kasus kendaraan Roda Dua pada Kantor Samsat
Polewali mandar)"

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 07 April 2017
Waktu : 13.00-15.00 Wita
Tempat : Ruang Munaqasyah

Demikian atas perhatiannya kami diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 195810221987031002

UNIVERSITAS
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Nomor : **635** / EB.I/PP.00.9/2016
Lampiran : -
Hal : **Undangan Seminar Proposal**
A.n. Fahri/10200112058

Samata, **26** Januari 2017

Kepada Yth:

- 1. Dr. Rahmawati Muin. M.Ag.** Sebagai Pembimbing I
- 2. Dr. Amiruddin K., M.El.** Sebagai Pembimbing II

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami mengundang bapak, untuk menghadiri seminar dan melaksanakan serta bertindak selaku pembimbing pada Seminar Draft Skripsi, yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 31 Januari 2017
Waktu : 09.00 - Selesai
Judul Skripsi : Praktek Pungutan Denda pajak dalam perspektif
Ekonomi Islam (Studi kasus kendaraan Roda Dua
kantor Samsat Polewali mandar)
Tempat : Ruang L.102

Atas segala perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalam,

Dekan,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

Catatan:

1. SK Pembimbing Draft Skripsi Terlampir
2. Pembimbing diharapkan hadir



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1240 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBIMBING/PEMBANTU PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Nama **Fahri**, Nim: **10200112058** tertanggal **01 November 2016** untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul: "**Praktek Pungutan Denda Pajak Kendaraan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kendaraan Motor pada Kantor Samsat Polewali Mandar)** "
- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing/pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas
b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing/pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama R.I. No 85 Tahun 2013 Jo tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mengangkat/ Menunjuk saudara :
1. **Dr. Rahmawati Muim, M.Ag.**, Sebagai Pembimbing Pertama.
2. **Dr. Amiruddin K., M.El.**, Sebagai Pembimbing Kedua.
- Kedua : Tugas Pembimbing/ Pembantu Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah,
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 07 November 2016
Dekan

Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa
2. Para Jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Arsip



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 199 TAHUN 2017**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI KOMPREHENSIF
JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan Ujian Komprehensif **Fahri** : , NIM: 10200112058
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk Panitia dan Tim Penguji
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama R.I. No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia dan Tim Penguji Komprehensif, Jurusan **EKONOMI ISLAM** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
- | | |
|--|-------------------------------------|
| Ketua | : Dr. H. Abdul Wahab, SE.,M.Si |
| Sekretaris | : Sukmawati, S.Ag. |
| Penguji Dirasah Islamiyah | : Dr. Syaharuddin, M.Si. |
| Penguji Dasar Ekonomi Syariah | : Dr. Amiruddin K., S.Ag.,M.ElP |
| Penguji Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan | : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag. |
| Pelaksana | : Arnidar Hamid, SE. |
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
4. Panitia dianggap bubar setelah menyelesaikan tugasnya.
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 03 Februari 2017
Dekan,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa
2. Para Dekan dalam Lingkup UIN Alauddin Makassar di Makassar
3. Arsip

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Praktik Pungutan Denda Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Kendaraan Roda Dua di Kantor Samsat Polewali Mandar)”**, yang disusun oleh Fahri, Nim: 10200112058, mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jum’at, tanggal 07 April 2017 M, bertepatan dengan 10 Rajab 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, dengan beberapa perbaikan.

Samata, 03 Mei 2017 M
07 Sya’ban 1438 H

Dewan Penguji

Ketua	: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Syaharuddin, M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Rahmawati Muin, M.Ag.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Amiruddin K., M.El	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag

NIP.19581022 198703 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/62/IPL/DPMPTSP/II/2017

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Sdr(i) FAHRI
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B- 56/Bakesbangpol/Bin/410.7/02/2017, Tgl. 13 Februari 2017

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama	: FAHRI
NIM/NIDN/NIP	: 10200112058
Asal Perguruan Tinggi	: UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Fakultas	: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jurusan	: EKONOMI ISLAM
Alamat	: KEL. DARMA KEC. POLEWALI

Untuk melakukan Penelitian di Kec. Polewali Kabupaten Polewali Mandar, terhitung mulai tanggal 01 Februari s/d 01 Maret 2017 dengan Judul **"PRAKTEK PUNGUTAN DENDA PAJAK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Kendaraan Roda Dua pada Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar"**.

Adapun Rekomendasi ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada Tanggal, 21 Februari 2017

a.n. **BUPATI POLEWALI MANDAR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



SUAIB JAMALUDDIN, SE., MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19580611 198801 1 001

Tembusan:

1. Unsur Forkopinda di tempat;
2. Kepala Samsat Kabupaten Polewali Mandar di tempat;
3. Camat Polewali di tempat;